

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN TERHADAP  
RUSIA PASCA INVASI RUSIA KE UKRAINA PADA TAHUN 2022—2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Disusun Oleh:

**RADITYA AJI MARTANTO**

21323017

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN TERHADAP  
RUSIA PASCA INVASI RUSIA KE UKRAINA PADA TAHUN 2022—2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

**RADITYA AJI MARTANTO**

21323017

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN TERHADAP  
RUSIA PASCA INVASI RUSIA-UKRAINA PADA TAHUN 2022—2023**  
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi



Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.
- 3 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 4 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025,



Handwritten signature of Raditya Aji Martanto.

Raditya Aji Martanto

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
DAFTAR ISTILAH.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Cakupan penelitian .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.6 Kerangka Pemikiran .....	12
1.7 Argumen Sementara .....	19
1.8 Metode Penelitian .....	19
1.8.1 Jenis Penelitian .....	19
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	20
1.8.4 Proses Penelitian.....	20
1.9 Sistematika Pembahasan .....	20
BAB 2.....	22
<b>RATIONALITY SEBAGAI FONDASI PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN .....</b>	<b>22</b>
2.1 <i>Rationality in German Foreign Policy</i> .....	22
2.2 <i>Individual Rationality</i> .....	25
2.2.1 <i>Merkel's Rationality</i> .....	25
2.2.2 <i>Scholz Rationality</i> .....	27
2.3 <i>Collective Rationality</i> .....	30
2.3.1 <i>Bundestag</i> .....	31
2.3.2 <i>The Think Tanks</i> .....	33
2.3.3 <i>Bundessicherheitsrat</i> .....	36
BAB 3.....	38

<b><i>DELIBERATIVE PROCESS</i> DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN JERMAN TERHADAP RUSIA PADA INVASI UKRAINA.....</b>	38
<b>3.1 <i>Deliberative Process</i> .....</b>	38
<b>3.2 <i>The Process</i>.....</b>	41
3.2.1 <i>Discussion and the Debate</i> .....	41
3.2.2 <i>Reaching Consensus</i> .....	47
<b>BAB 4.....</b>	55
<b>PENUTUP .....</b>	55
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	55
<b>4.2 Rekomendasi.....</b>	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Germany Party Policies Contestation</i> .....	32
---	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> <i>Rational Foreign Policy</i> .....	18
<b>Gambar 2.</b> <i>Credible Theories</i> .....	24

## DAFTAR SINGKATAN

BND	: Bundesnachrichtendienst
BSR	: Bundessicherheitsrat
CDU	: Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU	: Christlich-Soziale Union
DGAP	: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
FDP	: Freie Demokratische Partei
LNG	: Liquidized Natural Gas
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
SIPRI	: Stockholm International Peace Institute
SPD	: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SWP	: Stiftung Wissenschaft und Politik

## DAFTAR ISTILAH

- Zeitenwende* : Istilah titik balik zaman dalam konteks kebijakan luar negeri Jerman.
- Think Tanks* : Lembaga penelitian independen yang menghasilkan analisis, rekomendasi kebijakan, dan wacana strategis dalam bidang politik.
- Wandel durch Handel* : Frasa dalam bahasa Jerman yang memiliki arti “perubahan melalui perdagangan”.
- Ostpolitik* : Kebijakan luar negeri Jerman yang menormalisasi hubungan dengan Uni Soviet.
- Grundgesetz* : Konstitusi dasar Jerman yang berlaku sejak 1949 dan menjadi fondasi hukum bagi kebijakan domestik maupun luar negeri.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia sebagai respons atas invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Sebelumnya, hubungan Jerman dan Rusia ditandai oleh pendekatan pragmatis yang didominasi oleh kerjasama dan diplomasi. Namun, invasi militer Rusia terhadap Ukraina menjadi titik balik yang mengharuskan Jerman untuk mengevaluasi ulang orientasi strategisnya. Dalam memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dari buku *How States Think* karya John Mearsheimer dan Sebastian Rosato, yang menekankan pentingnya rasionalitas, pemikiran strategis, serta proses deliberatif dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh dalam perubahan kebijakan Jerman. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Jerman tidak bersifat spontan atau emosional, melainkan sebuah produk dari proses deliberatif yang terstruktur. Temuan ini menguatkan argumen bahwa negara bertindak berdasarkan pemahaman terhadap ancaman eksternal. Dalam konteks Jerman, kebijakan luar negeri mencerminkan integrasi antara kepentingan nasional dan nilai normatif yang dijalankan secara deliberatif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Jerman merupakan produk dari rasionalitas dalam menghadapi perubahan sistem internasional.

**Kata-kata kunci:** Kebijakan luar negeri, Jerman, Rusia, rasionalitas, proses deliberatif, Mearsheimer dan Rosato

## ABSTRACT

*This study examines the shift in Germany's foreign policy towards Russia in response to Russia's invasion of Ukraine in 2022. Previously, Germany–Russia relations were characterized by a pragmatic approach, dominated by cooperation and diplomacy. However, Russia's military aggression against Ukraine marked a turning point that compelled Germany to reassess its strategic orientation. To understand this dynamic, the study adopts the theoretical framework from *How States Think* by John Mearsheimer dan Sebastian Rosato, which emphasizes the importance of rationality, strategic thinking, and deliberative processes in foreign policy decision-making. Using a qualitative approach, this research analyzes various internal and external factors that influenced Germany's policy shift. The findings indicate that Germany's foreign policy decisions were neither spontaneous nor emotional, but rather a result of a structured deliberative process. These results support the argument that states act based on a rational understanding of external threats. In the context of German, foreign policy reflects an integration of national interest and normative values carried out through deliberative means. Thus, this study concludes that the transformation of Germany's foreign policy is a product of rationality in response to changes in the international system.*

**Keywords:** Foreign policy, German, Russia, rationality, deliberative process, Mearsheimer and Rosato

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak selalu bersifat statis, melainkan senantiasa berkembang mengikuti dinamika lingkungan internasional, tekanan domestik, dan interpretasi oleh para pemangku kebijakan. Selama bertahun-tahun Jerman mempertahankan pendekatan yang menekankan kerjasama sebagai stabilitasi politik. Bagi Jerman, upaya dalam merespon terhadap dua krisis besar yang melibatkan tindakan agresif oleh Rusia pada aneksasi Krimea tahun 2014 dan invasi ke Ukraina pada tahun 2022 menggambarkan sebuah perubahan signifikan dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Pada tahun 2014, Perdana Menteri Angela Merkel menyatakan bahwa tindakan Rusia yang memutuskan untuk melakukan aneksasi terhadap Krimea merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional dan tidak dapat ditoleransi, Jerman merespon dengan menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia (Kwiatkowska-Drożdż dan Popławski 2014). Namun, kebijakan luar negeri Jerman masih mengutamakan pentingnya untuk menjalin kerja sama dengan Rusia dalam bidang energi melalui *Nord Stream 2*. *Nord Stream 2* tersebut merupakan jalur pipa gas bawah laut yang menghubungkan Rusia dan Jerman langsung melalui Laut Baltik. Pada periode tersebut, Jerman masih mementingkan prinsip *Wandel durch Handel* atau perubahan melalui perdagangan. Prinsip ini merupakan doktrin lama dalam politik luar negeri Jerman yang percaya bahwa hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia dapat mendorong perubahan politik internal negara mitra.

Jerman dan Rusia memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat terutama di sektor energi. Jerman merupakan salah satu importir terbesar dalam gas alam Rusia dan Rusia memiliki peran kunci sebagai penjaga ketahanan energi Jerman. Beberapa proyek seperti *Nord Stream 1* dan *2* menunjukkan betapa strategisnya hubungan energi bagi Rusia dan Jerman (Nursyahbani & Marzaman, 2023, p. 37). *Nord Stream* merupakan pipa gas yang digunakan untuk menyuplai gas alam yang ada di Rusia ke negara-negara Eropa melalui Jerman. Perang Rusia-Ukraina yang terjadi mengancam Jerman dan seluruh Eropa untuk jatuh dalam krisis energi yang disebabkan oleh peningkatan tajam harga impor *Liquidized Natural Gas* (LNG) (Council of the European Union 2023).

Setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 terjadi ketidakstabilan regional. Tindakan militer oleh Rusia ini mendorong Jerman untuk mengevaluasi dan meninjau ulang pendekatan pragmatisnya terhadap Rusia. Kebijakan luar negeri Jerman yang sebelumnya memiliki dasar kerja sama ekonomi dan menggunakan pendekatan diplomasi, berubah drastis yang diiringi dengan sanksi-sanksi ekonomi serta upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia serta bantuan militer terhadap Ukraina. Langkah-langkah tersebut mencerminkan sikap Jerman yang berkomitmen terhadap prinsip hukum internasional (United Nations, 2023). Berdasarkan pada *Grundgesetz* yang merupakan doktrin politik Jerman setelah 1949, Jerman menekankan tiga prinsip utama dalam kebijakan luar negerinya yaitu tidak mengirimkan pasukan aktif ke luar negeri, tidak menjadi kekuatan nuklir, dan berfokus pada kekuatan sipil (Deutscher Bundestag, 2025). Namun, setelah Kanselir Olaf Scholz secara resmi

mengumumkan istilah *Zeitenwende*, hal ini menandai transformasi dalam orientasi strategis Jerman.

Invasi tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi Rusia dan Putin terhadap Ukraina karena dianggap mengancam kepentingan serta keamanan Rusia. Rusia mengklaim bahwa upaya NATO untuk bersekutu dengan negara-negara Eropa Timur memberikan sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Rusia (Achudume 2023, 91). Perang antara kedua negara ini juga memberikan dampak global yang sangat luas, mencakup banyak aspek, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Banyak komunitas internasional, seperti negara Barat mengecam tindakan invasi Rusia ini dan memberlakukan berbagai sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia (Oxenstierna dan Olsson 2015, 10–18). Beberapa sanksi, seperti pembatasan akses ke pasar keuangan internasional, pembekuan aset, dan pembatasan perdagangan memiliki tujuan utama untuk melemahkan kemampuan Rusia dalam melanjutkan agresinya (Oxenstierna dan Olsson 2015, 10–18).

Terlebih alasan utama dari invasi Rusia terhadap Ukraina ini muncul ketika presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy meminta bantuan kepada Barat agar Ukraina dapat bergabung dengan NATO (Saeri dkk. 2023, 320). Niat Ukraina untuk bergabung dengan NATO dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan negara Rusia, Rusia mengancam Zelenskiy yang meneruskan niatnya untuk bergabung dengan NATO dan tidak menganggap serius ancaman oleh Rusia (Saeri dkk. 2023, 320). Serangan oleh Rusia dianggap sebagai sebuah respon alami terhadap tindakan agresif dari Barat (Götz dan Ekman 2024, 193).

Tindakan Amerika Serikat beserta NATO dianggap sebagai sebuah kesengajaan oleh Rusia untuk membangun aliansi militer strategis di Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia untuk memicu kemarahan Rusia (Menon dan Ruger 2020, 375). Mearsheimer menyebutkan:

*“the United States is principally responsible for causing the Ukrainian crisis . . . The United States has pushed forward policies toward Ukraine that Putin and other Russian leaders see as an existential threat . . . Specifically, I am talking about America’s obsession with bringing Ukraine into NATO and making it a Western bulwark on Russia’s border”* (Mearsheimer 2020, 376).

Mearsheimer menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Ukraina adalah Amerika Serikat karena negara tersebut mengatakan bahwa Rusia adalah sebuah ancaman bagi Ukraina (Mearsheimer 2020, 376). Terutama dengan obsesi Amerika Serikat terhadap Ukraina untuk bergabung ke NATO dan menjadikannya sebagai pertahanan utama bagi Barat yang berada di perbatasan Rusia.

Salah satu alasan terbesar Rusia menginvasi Ukraina disebabkan oleh obsesi Putin tentang keberadaan Ukraina yang menjadi sebuah bagian kecil Rusia dari bangsa pan-Rusia (Kuzio 2022, 40). Sikap Rusia tersebut dilandasi oleh kepercayaan bahwa kaum Bolshevik yang menciptakan “Ukraina buatan”, hal ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat Austria yang membangun Ukraina di abad sembilan belas (Kuzio 2022, 40). Obsesi Putin terhadap keberadaan Ukraina memiliki arti bahwa perang Rusia-Ukraina tidak akan berhenti hingga Ukraina kembali menjadi negara pan-Rusia (Kuzio 2022, 42). Rusia seringkali menyatakan bahwa kedekatan hubungan Ukraina dan Barat akan memicu ketegangan (Götz 2019, 482). Rusia tidak hanya sekali membuat kebijakan yang membendung

pengaruh Barat untuk masuk ke negara-negara pasca-Soviet karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Rusia.

Dalam konteks geopolitik, Jerman dan Rusia memiliki sejarah panjang dengan interaksi yang kompleks, dimulai dari masa Perang Dingin hingga era pasca-Soviet (Suryadi Bakry 2017, 75–89). Interaksi kompleks antara kedua negara tersebut ditandai dengan berbagai kepentingan yang saling memiliki keterkaitan, termasuk adanya kerjasama ekonomi, politik dan persaingan geopolitik. Bagi Jerman, Rusia merupakan mitra yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi stabilitas dan keamanan energi yang ada di seluruh di kawasan Eropa. Sebaliknya, bagi Rusia, Jerman merupakan mitra penting dalam menjadi mediator ke Barat yang dapat membantu memperkuat posisi Rusia di Eropa. Namun, setelah invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022, invasi Rusia terhadap Ukraina dianggap sebagai titik balik pada hubungan antara Jerman dan Rusia (Trenin 2018, 1–18).

Tindakan Jerman yang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia mengindikasikan telah terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia. Jerman dan Rusia merupakan dua negara di Eropa yang memiliki hubungan bilateral sangat erat. Jerman telah sering mengubah kebijakannya terhadap aksi Rusia. Hal tersebut sudah terjadi sejak Rusia memutuskan untuk melakukan agresi kepada Krimea yang memaksa Jerman untuk mengecam Rusia melalui pemberlakuan sanksi ekonomi di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel (Nursyahbani dan Marzaman 2023, 37).

Sanksi dan perubahan kebijakan Jerman tersebut terjadi kembali setelah invasi Ukraina oleh Rusia yang ditandai dengan kehadiran militer Rusia di kota

Donbas, Ukraina. Kebijakan Jerman kembali lagi mengalami transformasi yang signifikan ditandai dengan penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia, peningkatan dukungan militer terhadap Ukraina, bantuan kemanusiaan untuk Ukraina, dan upaya untuk melakukan diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia. Keputusan tersebut mencerminkan sikap Jerman yang menandakan pergeseran pendekatan berbeda terhadap Rusia menjadi lebih tegas. Jerman dan NATO sadar atas pentingnya stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa yang terancam akibat aksi militer Rusia (Molder 2006, 7).

Olaf Scholz sebagai Kanselir Jerman menyebutkan bahwa Uni Eropa juga menjadi salah satu prioritas bagi kepentingan Jerman (Bundesregierung 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan kebijakan luar negeri Jerman tidak hanya didasarkan oleh kepentingan nasional semata, tetapi juga dalam konteks tujuan dan keamanan kolektif Uni Eropa secara keseluruhan, serta memperkuat kedaulatan Uni Eropa secara berkelanjutan (Blumenau 2022, 1899). Jerman melakukan hal tersebut karena sebelumnya Jerman pernah dikritik sebagai *free-rider* keamanan kolektif di Eropa (Blumenau 2022, 1903). Hal tersebut terjadi karena Jerman kurang memberikan dukungan militer dan anggaran pertahanan yang rendah dalam negaranya. Pengaruh eksternal tersebut mendorong Jerman untuk mengubah stigma bahwa Jerman kurang memiliki aliansi dengan negara Barat (Blumenau 2022, 1900).

Dengan demikian, latar belakang perubahan kebijakan Jerman dari 2014 ke 2022 bukan merupakan respon spontan terhadap agresi Rusia terhadap Ukraina, tetapi juga sebagai cerminan dari proses berpikir sebuah negara. Melalui rasionalitas dan proses deliberatif, Jerman menunjukkan perubahan yang

menunjukkan transisi dari kebijakan yang pragmatis menuju kebijakan yang berbasis pada pertimbangan keamanan nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Jerman mengubah kebijakan luar negeri terhadap Rusia pasca invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia pasca-invasi Rusia-Ukraina.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia.

## **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus untuk membahas proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada awal tahun 2022. Penelitian ini akan membahas dinamika antar aktor dalam parlemen Jerman 3 hari setelah Rusia memutuskan untuk menginvasi Ukraina di awal tahun 2022. Penelitian ini akan menganalisis rasionalitas kebijakan luar negeri Jerman pada dua tingkat utama, yaitu *individual rationality* dan *collective rationality* serta menganalisis proses deliberasi yang terjadi dalam sistem parlemen Jerman.

Penelitian ini akan terbatas pada periode awal invasi Rusia ke Ukraina di untuk memahami proses perubahan kebijakan luar negeri secara kronologis. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan luar negeri Jerman sebelum dan sesudah

konflik, termasuk adanya perubahan strategi, prioritas dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Jerman dalam upaya mendukung Ukraina dan melepaskan ketergantungan sumber energi.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari buku, artikel, ataupun jurnal, sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Hans-Hermann Hohmann, Christian Meier dan Heinz Timmerman pada tahun 2007 yang berjudul “*Russia and Germany in Europe: Recent Trends in Political and Economic Relations*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara Jerman dan Rusia memiliki signifikansi yang besar untuk masa depan Eropa dan hubungan ekonomi Jerman dan Rusia telah berkembang secara positif melalui adanya konflik yang panjang. Hubungan ekonomi Jerman dan Rusia realitasnya mengalami kemajuan di periode tersebut (Höhmann dkk. 1997, 24). Motif kepentingan ekonomi Rusia terhadap Jerman pada dasarnya bersifat politis, meskipun gejolak politik dan ekonomi di Rusia menghambat proses kerja sama antara kedua negara (Höhmann dkk. 1997, 24). Penelitian ini berfokus terhadap struktur hubungan ekonomi antara kedua negara ini, yaitu Rusia dan Jerman, penelitian tersebut mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjalin kerja sama dengan Rusia harus memiliki kesiapan untuk mengambil sebuah risiko, improvisasi dan memiliki pengetahuan yang luas serta terkini mengenai lingkungan sosial-ekonomi serta mitra yang dapat diandalkan. Peneliti disini tidak hanya ingin melihat perubahan kebijakan luar negeri Jerman pada

sektor ekonomi dan ketergantungan energi, namun peneliti ingin membahas proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman sebagai sebuah respons terhadap Rusia yang disebabkan oleh tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina.

Penelitian kedua berjudul “*From Ostpolitik to ‘frostpolitik’ Merkel, Putin and German Foreign Policy towards Russia*” yang ditulis oleh Tuomas Forsberg pada tahun 2016. Penelitian tersebut membahas dinamika hubungan Jerman dan Rusia yang dipertimbangkan menjadi sebuah landasan keamanan Eropa. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pendekatan Jerman dalam mengatasi krisis yang terjadi di Krimea. Kajian tersebut berfokus dengan pendekatan melalui kebijakan *ostpolitik* Jerman yang berakar dari era Perang Dingin yang menekankan keterlibatan kerja sama dengan Rusia. Namun, Merkel merubah preferensi memimpin dengan pendekatan lebih keras dan skeptis yang disebabkan oleh krisis Ukraina, Forsberg menyebut perpindahan pendekatan ini menjadi *frostpolitik*. Penelitian ini ingin melihat proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia setelah Rusia memutuskan untuk melakukan invasi skala besar ke Ukraina pada awal tahun 2022.

Kemudian penelitian ketiga ditulis oleh A.Amirah Nursyahbani dan Atika Puspita Marzaman berjudul “Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Stabilitas Suplai Energi di Eropa” pada tahun 2023. Penelitian tersebut menganalisis invasi masif yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina yang bertujuan untuk memitigasi ancaman dari blok Barat dan pengaruh Amerika Serikat dalam rangka mempertahankan hubungan serta kedekatannya dengan negara-negara pecahan Soviet. Sejak terjadinya konflik tersebut, terjadi sebuah krisis energi mendunia yang menjadi lebih parah dengan adanya pandemi COVID-19 (Nursyahbani dan

Marzaman 2023, 34). Nursyahbani menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan aspek energi yang terdampak oleh perang Rusia-Ukraina, berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti, yaitu untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia meskipun juga akan membahas aspek ketergantungan energi dari Jerman terhadap Rusia sebagai negara pemasok energi terbesar bagi Jerman.

Penelitian keempat ditulis oleh Hongyi Yu yang berjudul “*European Energy Prospect Under the Russo-Ukrainian War*” pada tahun 2022. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa perang yang disebabkan oleh Rusia dan Ukraina tidak hanya menjatuhkan korban jiwa (Yu 2022). Namun, konflik tersebut juga menyebabkan krisis energi terutama di Uni Eropa. Sebelum terjadinya konflik, sebanyak 40% gas yang ada di Eropa tersebut tersedia oleh Rusia (Yu 2022). Setelah terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina dan dari sekian banyak sanksi ekonomi yang diberlakukan kepada Rusia oleh negara-negara barat termasuk Uni Eropa, seperti ditanggungkannya izin dari pipa gas *Nord Stream 2* yang memiliki kapasitas gas sebanyak 55 bcm (*billion cubic meters*), tetapi pada saat ini tidak memiliki daya transfer apapun dikarenakan izin penggunaan yang ditanggungkan oleh Jerman (Yu 2022). Penelitian tersebut berfokus terhadap bagaimana Uni Eropa bersama Jerman menghadapi perang Rusia Ukraina dan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan hasil akhir dari struktur energi Eropa di masa depan mendatang. Dengan mengutamakan analisis terhadap keberadaan dari konsep “Re-Power EU” yang menggunakan riset dari Nature, IEA, World Bank (Yu 2022). Penelitian ini ditujukan untuk membantu para pembaca untuk memahami bagaimana Uni Eropa mengatasi krisis energi yang sudah terjadi sejak lama dan

mengalami eskalasi sejak terjadinya invasi Rusia-Ukraina. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti tidak hanya membahas satu aspek, seperti aspek energi melainkan untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia pasca invasi Rusia-Ukraina secara keseluruhan.

Penelitian kelima ditulis oleh Bernhard Blumenau dengan judul “*Breaking with the convention? Zeitenwende and the traditional pillars of German Foreign Policy*” pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas kebijakan luar negeri Jerman dan faktor keamanan Jerman beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina. Artikel ini mengidentifikasi bahwa *ostpolitik* dan konsep *wandel durch handel* tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar kebijakan luar negeri Jerman dengan Rusia. Penelitian tersebut berfokus untuk mendeskripsikan apa yang menyebabkan Jerman untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak sekadar mendeskripsikan perubahan tersebut, namun secara spesifik untuk membahas dan menganalisis bagaimana proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman ini terjadi.

Penelitian ini menganalisis bagaimana Jerman mengubah kebijakan luar negerinya secara keseluruhan sebagai respon terhadap tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina di awal tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan buku *How States Think* oleh Mearsheimer dan Rosato. Dalam studi kasus ini, perubahan kebijakan luar negeri Jerman mencerminkan *rational foreign policy* dikarenakan keputusan Jerman untuk menentukan kebijakan luar negerinya tidak ditentukan oleh satu aktor, tetapi melibatkan berbagai aktor dalam parlemen Jerman dan terbentuk melalui proses deliberatif.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Teori *Rationality in Foreign Policy* dalam bukunya *How States Think* oleh John J. Mearsheimer dan Sebastian Rosato. Kedua penulis tersebut menawarkan dua konsep utama yang menjadi landasan analitis dalam memahami dinamika ini yakni, rasionalitas dan proses deliberatif. Kedua konsep ini mampu menjelaskan bagaimana sebuah negara berpikir dan bertindak atas sebuah fenomena yang terjadi.

Mearsheimer dan Rosato berargumen bahwa negara bergerak dalam sebuah sistem internasional yang anarkis dan tidak ada satu otoritas kekuasaan yang ada untuk mengatur perilaku sebuah negara (Mearsheimer dan Rosato 2023, 13). Dalam konteks ini, negara-negara cenderung bertindak untuk memaksimalkan kekuasaan dan melindungi kepentingan nasional mereka.

Mearsheimer dan Rosato juga menjelaskan dalam bukunya bahwa konsep rasionalitas menjadi sebuah landasan untuk menguraikan bagaimana sebuah negara bertindak dan mengambil sebuah keputusan (Mearsheimer dan Rosato 2023, 10–11). Rasionalitas dalam buku Mearsheimer dan Rosato dijelaskan sebagai kemampuan sebuah negara untuk memahami dunia dan mendalami proses atau cara kerja serta alasannya untuk memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Kemudian, Mearsheimer dan Rosato menjelaskan dalam bukunya bahwa sebuah negara rasional akan selalu menggunakan *credible theories* dalam menentukan strateginya (Mearsheimer dan Rosato 2023, 7). Mearsheimer dan Rosato berpendapat bahwa pembuat kebijakan yang rasional menggunakan *credible theories* untuk membantu mereka dalam upaya memahami dunia (Mearsheimer dan Rosato 2023, 7). Kemudian, Mearsheimer dan Rosato

menganggap bahwa pembuat kebijakan ketika sedang dihadapi oleh sebuah fenomena yang mengharuskan mereka untuk membuat keputusan, kemudian menggunakan *credible theories* dalam menentukan arah kebijakan suatu negara maka hal tersebut akan menghasilkan sebuah kebijakan yang rasional (Mearsheimer dan Rosato 2023, 7). Disebutkan dalam bukunya *How States Think* bahwa *credible theories* memiliki 3 aspek, yaitu asumsi, logika kausal, dan bukti empiris.

Asumsi yang dimaksud memiliki fungsi utama sebagai titik berangkat konseptual yang menjelaskan kondisi dasar dalam sebuah fenomena (Mearsheimer dan Rosato 2023, 38). Asumsi ini mencakup pandangan bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik global yang memiliki tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negara tersebut. Kemudian Mearsheimer dan Rosato juga menjelaskan bahwa negara beroperasi dalam sistem internasional yang anarkis tanpa otoritas tertinggi yang dapat menjamin keamanan (Mearsheimer dan Rosato 2023, 39). Maka dari itu, asumsi merupakan kerangka yang dapat membantu untuk memahami motivasi dasar dari sebuah negara dan fenomena dalam lingkungan sekitarnya. Kedua, logika kausal dibangun atas asumsi untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen (Mearsheimer dan Rosato 2023, 39). Logika kausal tersebut menunjukkan bagaimana suatu fenomena dapat menghasilkan keputusan tertentu dalam kebijakan luar negeri (Mearsheimer dan Rosato 2023, 39). Seperti contoh, dalam teori *balance of threat* logika kausal menjelaskan bahwa ketika suatu negara menghadapi lawan dengan kekuatan militer yang signifikan maka negara tersebut akan merasa terancam dan terdorong untuk mencari sebuah aliansi dengan negara

lain (Mearsheimer dan Rosato 2023, 39). Ketiga, bukti empiris memiliki peran penting untuk menguji kebenaran dari asumsi dan logika kausal tersebut. Bukti ini memiliki bentuk untuk menandakan bahwa ada fenomena di masa lampau yang pernah terjadi (Mearsheimer dan Rosato 2023, 40). Sebagai contoh, NATO dibentuk oleh Amerika Serikat dapat dipahami sebagai sebuah bukti empiris dari logika *balance of threat*, yakni upaya kolektif untuk melawan ancaman Soviet selama Perang Dingin (Mearsheimer dan Rosato 2023, 43). Bukti empiris memiliki peran untuk memastikan bahwa teori tidak berhenti sebagai sebuah spekulasi, melainkan memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan mengenai realitas internasional melalui rekaman peristiwa sejarah di masa lampau. Secara keseluruhan, ketiga elemen dari *credible theory* yang dijelaskan oleh Mearsheimer dan Rosato memiliki keterkaitan seperti, asumsi sebagai fondasi konseptual, logika kausal yang menawarkan *causal mechanism*, dan bukti empiris sebagai penguji terhadap validitas teori.

Mearsheimer dan Rosato membedakan antara rasionalitas individu dan kolektif, masing-masing memiliki implikasi signifikan terhadap cara negara merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan luar negeri. Rasionalitas individu merujuk pada kemampuan seorang individu, terutama dari para pemimpin dan pembuat kebijakan yang berusaha untuk membuat kebijakan berdasarkan informasi yang ada (Mearsheimer dan Rosato 2023, 20). Mearsheimer dan Rosato berargumen bahwa setiap individu dalam posisi kekuasaan seperti Presiden, Kanselir, atau Raja sering kali berusaha untuk memaksimalkan kepentingan nasional mereka dengan cara yang paling efisien. Dalam konteks ini, pemimpin negara yang rasional akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi

risiko dan manfaat dari keputusan yang diambil. Namun, Mearsheimer dan Rosato juga mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak secara rasional, hal tersebut terjadi ketika ada bias kognitif, emosi dan tekanan dari lingkungan politik yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil (Mearsheimer dan Rosato 2023, 21). Dalam *collective rationality*, teori kredibel tidak dapat berlaku karena teori kredibel hanya ada pada *individual rationality* (Mearsheimer dan Rosato 2023, 63). Hal ini terjadi karena definisi dari *collective rationality* merupakan mekanisme kelembagaan yang ada pada sebuah negara untuk membantu dalam proses deliberatif (Mearsheimer dan Rosato 2023, 23).

Di sisi lain, Mearsheimer dan Rosato menyebutkan bahwa rasionalitas kolektif melibatkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok atau institusi seperti contoh, Badan Intelijen Negara, Lembaga Riset Kebijakan Negara, dan Partai Politik. Dalam rasionalitas kolektif berbagai aktor dengan kepentingan dan perspektif berbeda berinteraksi dalam proses deliberasi. Mearsheimer dan Rosato menekankan bahwa sebuah kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh satu aktor individu, tetapi ditentukan melalui interaksi dalam proses deliberasi (Mearsheimer dan Rosato 2023, 22). Dalam konteks rasionalitas kolektif, keputusan yang diambil mencerminkan konsensus yang dicapai melalui proses deliberatif, hal tersebut terjadi ketika berbagai pandangan dan kepentingan dipertimbangkan. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi bias individu dan meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil.

Mearsheimer dan Rosato juga menekankan bahwa proses deliberasi menjadi bagian krusial dalam pengambilan keputusan (Mearsheimer dan Rosato 2023, 37). Dalam proses pengambilan keputusan, berbagai perspektif dan kepentingan harus

dipertimbangkan sebelum mencapai konsensus. Dalam konteks ini, Mearsheimer dan Rosato mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang membentuk proses deliberatif. Pertama, Mearsheimer dan Rosato mengedepankan pentingnya informasi dan analisis dalam pengambilan keputusan. Sebuah negara harus mengumpulkan data relevan dan menganalisis situasi internasional untuk memahami fenomena yang kemudian akan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan (Mearsheimer dan Rosato 2023, 42). Proses ini melibatkan pengumpulan intelijen, konsultasi dengan ahli dan akademisi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Informasi dan data yang akurat menjadi dasar bagi pemimpin sebuah negara untuk membuat keputusan yang strategis.

Kedua, Mearsheimer dan Rosato menekankan peran aktor dalam proses deliberatif. Mearsheimer dan Rosato berargumen bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh individu tunggal, melainkan melibatkan interaksi dari berbagai aktor, termasuk pemimpin politik, penasihat, lembaga pemerintah, serta akademisi (Mearsheimer dan Rosato 2023, 22). Setiap aktor mewakili perspektif dan kepentingan yang berbeda, hal tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir dari adanya proses deliberasi. Seperti misal, seorang penasihat keamanan nasional mungkin memiliki sebuah pandangan yang agresif, sementara seorang diplomat lebih cenderung untuk mencari solusi diplomatik. Proses deliberatif memungkinkan berbagai aktor tersebut untuk berdebat, melakukan negosiasi, dan mencari titik temu dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri.

Lebih lanjut, Mearsheimer dan Rosato mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam jalannya proses deliberatif. Salah satunya adalah masalah bias kognitif, hal tersebut terjadi ketika pemimpin dan penasihat terpengaruh oleh

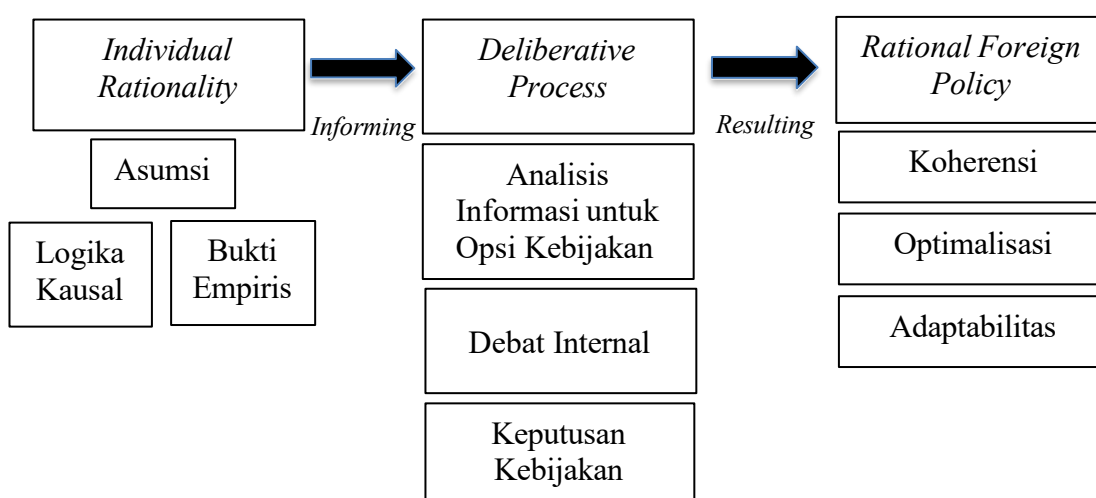
sebuah pandangan dan asumsi yang sudah ada (Mearsheimer dan Rosato 2023, 94–95). Bias tersebut dapat menghambat kemampuan para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, Mearsheimer dan Rosato juga mencatat bahwa proses deliberatif dapat terhambat oleh konflik kepentingan di berbagai aktor yang terlibat, hal tersebut dapat menyebabkan ketegangan dalam pengambilan keputusan (Mearsheimer dan Rosato 2023, 79).

Mearsheimer dan Rosato menjelaskan dalam bukunya bahwa negara yang rasional akan selalu menggunakan teori kredibel dan proses deliberatif untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Meskipun teori kredibel dan proses deliberatif merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya menduduki tingkatan yang berbeda. Teori kredibel hanya ada pada *individual rationality* sebagaimana dijelaskan oleh Mearsheimer dan Rosato yang menyebutkan bahwa individu yang menggunakan teori kredibel merupakan “*homo theoreticus*” (Mearsheimer dan Rosato 2023, 63). Sementara proses deliberatif, merupakan proses agregasi yang mengumpulkan berbagai komponen dari sebuah negara menurut Mearsheimer dan Rosato seperti, *individual rationality* dengan *collective rationality* (Mearsheimer dan Rosato 2023, 65).

Dalam konteks ini, Mearsheimer dan Rosato menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses deliberatif. Mereka berargumen bahwa untuk mencapai keputusan yang matang, penting bagi sebuah negara untuk memiliki sebuah mekanisme yang dapat menjangkau partisipasi yang luas dari berbagai aktor dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, proses deliberatif yang dikemukakan oleh Mearsheimer dan Rosato memberikan wawasan yang mendalam tentang

bagaimana sebuah negara merumuskan kebijakan luar negeri (Mearsheimer dan Rosato 2023, 101). Proses deliberatif tidak menjadi sekedar langkah administratif, tetapi menjadi bagian inti dari bagaimana sebuah negara berpikir dan bertindak dalam panggung internasional. Melalui pertimbangan dari berbagai perspektif, informasi dan konteks domestik, negara dapat merumuskan sebuah kebijakan yang lebih informasional dan strategis.

**Gambar 1. Rational Foreign Policy**



Sumber: Mearsheimer dan Rosato 2023 (diolah oleh peneliti).

Secara keseluruhan, Mearsheimer dan Rosato menegaskan bahwa pemahaman mengenai proses deliberatif dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sangat krusial untuk memahami bagaimana sebuah negara bertindak di arena internasional (Mearsheimer dan Rosato 2023, 37). Dengan demikian, Mearsheimer dan Rosato dapat mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yang rasional bergantung pada dua pilar utama, yaitu *credible theories* dan proses deliberatif (Mearsheimer dan Rosato 2023).

## **1.7 Argumen Sementara**

Melalui rumusan masalah dan kerangka pemikiran maka argumen sementara dalam penelitian ini adalah penggunaan *credible theory* yang berisi asumsi menjadi gagasan dasar untuk membangun argumen teoritis, logika kausal dalam menjelaskan sebab akibat, dan beberapa bukti empiris. Hal ini diperkuat dengan proses deliberatif yang diawali dengan analisis informasi oleh badan intelijen Jerman untuk memetakan fenomena internasional yang sedang terjadi untuk memberikan opsi kebijakan, dilanjutkan dengan menjelaskan debat antar aktor yang terlibat dalam menentukan keputusan kebijakan yang diakhiri dengan keputusan final dari kebijakan luar negeri oleh Kanselir. Dengan demikian, berbagai langkah di atas diambil oleh pemerintah Jerman untuk mencapai sebuah kebijakan luar negeri rasional yang koheren, optimal, dan dapat beradaptasi pada perubahan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini akan menjelaskan serta menjabarkan proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia pasca invasi Rusia-Ukraina pada tahun 2022-2023.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini merupakan perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia. Sedangkan objek dari penelitian ini merupakan proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia pasca invasi Rusia-Ukraina.

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang berupa buku, jurnal, artikel yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang kemudian akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini.

### 1.8.4 Proses Penelitian

Proses dari penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data seperti kajian dan studi-studi literatur terdahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data yang digunakan untuk mengklasifikasi pembahasan yang memiliki relevansi dengan topik peneliti. Kemudian tahap terakhir adalah eksplanasi yang dilakukan untuk menginterpretasikan data-data relevan yang sudah diolah kedalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dijabarkan dalam 4 bab sebagaimana:

1. Bab 1 dari penelitian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, proses penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab 2 akan membahas *credible theories* dan konsep rasionalitas dalam buku Mearsheimer dan Rosato untuk memberikan dasar perubahan kebijakan Jerman dan perubahan sikap Jerman terhadap Rusia pasca terjadinya invasi Rusia-Ukraina yang ditandai dengan keberadaan militer Rusia dalam kota Donbas.

3. Bab 3 dari penelitian ini membahas proses deliberatif dalam sistem parlemen Jerman untuk merumuskan kebijakan luar negeri Jerman yang bertujuan sebagai upaya menciptakan kebijakan luar negeri yang rasional.
4. Bab 4 kemudian akan membahas kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## BAB 2

### ***RATIONALITY* SEBAGAI FONDASI PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN**

Pada bab ini, pembahasan akan berfokus terhadap *credible theories* dan rasionalitas dalam buku Mearsheimer dan Rosato yang membantu menjelaskan bagaimana Jerman mengubah kebijakan luar negerinya. Bab ini juga membahas mengenai tanggapan para Kanselir Jerman mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina. Dalam memahami bagaimana Jerman dapat menyesuaikan kebijakannya terhadap Rusia, penting untuk melihat *credible theories* dan konsep rasionalitas yang melatarbelakangi keputusan Jerman dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

#### ***2.1 Rationality in German Foreign Policy***

Selaras dengan pernyataan Mearsheimer dan Rosato dalam bukunya, bahwa pembuat kebijakan akan menerapkan *credible theories* sebagai dasar fondasi kebijakan luar negerinya. Dalam *credible theories* asumsi dijadikan gagasan yang diterima sebagai titik awal untuk membangun sebuah argumen teoritis. Dalam pendekatan penelitian ini terdapat beberapa asumsi utama: sistem internasional bersifat anarkis, negara adalah aktor utama, dan negara bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasional.

Melalui asumsi dapat dilihat dalam kebijakan luar negeri Jerman sebelum dan sesudah invasi Rusia terhadap Ukraina. Hal tersebut dapat dilihat ketika Jerman meningkatkan anggaran pertahanan dan memberikan dukungan militer kepada

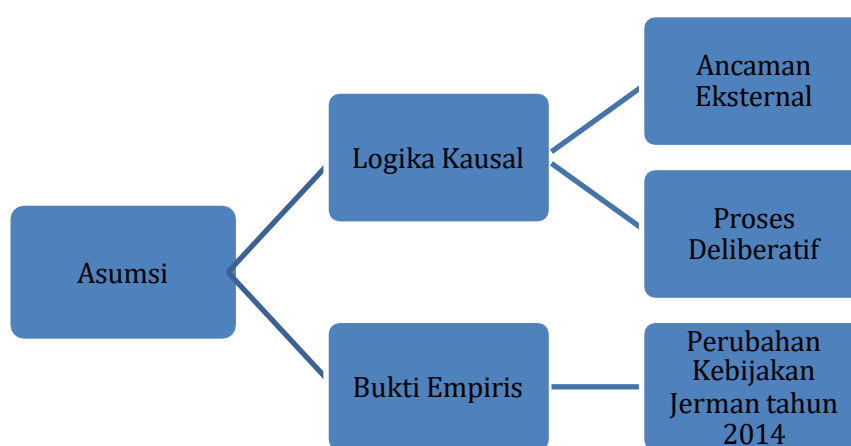
Ukraina data Kementerian Pertahanan Jerman menunjukkan terdapat peningkatan anggaran pertahanan dari 1,53% menjadi 2% dalam PDB (Sheahan dan Marsh 2022). Hal tersebut mencerminkan perubahan kebijakan Jerman yang sebelumnya memiliki dasar pasifis menjadi bentuk kebijakan pertahanan yang lebih responsif. Keputusan Jerman untuk menyetujui pengiriman senjata dan Tank Leopard 2 ke Ukraina juga menunjukkan prioritas baru terhadap kebijakan baru Jerman yang memiliki dasar pertahanan sebagai respon invasi Rusia terhadap Ukraina.

Logika kausal mendasari keputusan Jerman untuk mengubah kebijakan luar negerinya dapat dilihat dalam analisis dampak dari invasi Rusia. Para pemangku kebijakan Jerman sadar bahwa ketidakstabilan yang timbul oleh invasi Rusia tidak hanya berdampak pada Ukraina, tetapi juga berpengaruh pada keamanan Eropa secara keseluruhan. Tindakan Rusia dilihat sebagai upaya untuk mengubah tatanan keamanan Eropa secara sepihak. Logika kausal tersebut menjelaskan bahwa jika Jerman tidak mengambil tindakan tegas, maka risiko eskalasi konflik akan meningkat. Dengan demikian, keputusan untuk mengirimkan senjata dan dukungan militer ke Ukraina merupakan langkah strategis yang diambil untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Bukti empiris memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pola perilaku Rusia. Perubahan kebijakan luar negeri Jerman dapat dibuktikan secara empiris melalui berbagai indikator konkret. Misal, seperti perubahan kebijakan Jerman pada tahun 2014 ketika Rusia memutuskan untuk melakukan aneksasi terhadap Krimea. Jerman memberikan respon terhadap Rusia dengan cara menerapkan beberapa sanksi ekonomi, namun Jerman masih melanjutkan kerjasama di bidang energi seperti *Nord Stream 2*. Namun, respon tersebut tidak

memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku Rusia untuk berhenti melakukan agresi terhadap Ukraina. Maka dari itu, pada tahun 2022 Jerman mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Rusia secara keseluruhan dengan dasar apabila Jerman memberikan respon yang sama seperti pada tahun 2014 dan Rusia terus dibiarkan melanjutkan agresinya terhadap Ukraina, maka tatanan keamanan internasional Eropa akan runtuh.

**Gambar 2. Credible Theories**



Sumber: Mearsheimer dan Rosato 2023 (diolah oleh peneliti)

Perubahan kebijakan luar negeri Jerman dalam merespons invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 mencerminkan penerapan proses deliberatif yang melibatkan analisis informasi, aktor, dan memiliki tujuan untuk menghindari bias kognitif. Dalam konteks ini, teori kredibel yang berisi asumsi, logika kausal, dan bukti empiris yang memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Jerman yang rasional. Proses ini menunjukkan bagaimana negara dapat beradaptasi dan merumuskan kebijakan yang rasional dalam menghadapi sebuah tantangan. Figur tersebut menjelaskan proses yang dilalui oleh Jerman untuk merumuskan kebijakan luar negerinya melalui *credible theories*.

Pada akhirnya, integrasi teori kredibel dapat diterapkan untuk memahami perubahan kebijakan luar negeri Jerman. Melalui gabungan asumsi, logika kausal, dan bukti empiris dapat ditunjukkan bahwa keputusan Jerman untuk merespon invasi Rusia tidak terjadi secara spontan, tetapi berdasarkan proses deliberatif yang melibatkan analisis terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

## **2.2 *Individual Rationality***

Dalam kebijakan luar negeri, konsep *individual rationality* merujuk pada kapasitas seorang pemimpin untuk memahami dinamika lingkungan internasional, mengevaluasi informasi, serta merumuskan sebuah keputusan strategis berdasarkan perhitungan yang rasional. Mearsheimer dan Rosato dalam bukunya menekankan bahwa negara pada dasarnya berpikir melalui individu, terutama pada pemangku kebijakan. Dalam konteks Jerman, Angela Merkel dan Olaf Scholz merupakan contoh konkret dari bagaimana pertimbangan *individual rationality* memainkan peran sentral dalam menyikapi ancaman eksternal, khususnya invasi Rusia terhadap Ukraina. Dalam penelitian ini, penting untuk menggunakan contoh *individual rationality* dari Angela Merkel dan Olaf Scholz karena kedua orang tersebut menempati kedudukan tertinggi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh Jerman. Hal ini selaras dengan pernyataan Mearsheimer dan Rosato dalam bukunya yang menjelaskan bahwa keputusan kebijakan akan ditentukan oleh *the ultimate decider* (Mearsheimer dan Rosato 2023, 65).

### **2.2.1 *Merkel's Rationality***

Salah satu wujud konkret dari rasionalitas individu dalam konteks pengambilan kebijakan luar negeri Jerman dapat dilihat melalui pernyataan mantan kanselir Angela Merkel. "*It's an objective breach of all international laws and of*

*everything that allows us in Europe to live in peace at all*". Merkel menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas Eropa dalam menghadapi sebuah fenomena yang sedang terjadi (Rinke dan Marsh 2022). Pernyataan tersebut mencerminkan proses berpikir yang tidak hanya dilandasi oleh penilaian moral, tetapi juga penalaran rasional atas pelanggaran terhadap tatanan hukum internasional sebagai fondasi stabilitas dan perdamaian dalam kawasan Eropa.

Dalam konteks ini, invasi Rusia terhadap Ukraina menjadi fokus utama bagi Jerman dan seluruh Eropa. Merkel sempat memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara mengenai agresi yang dilakukan oleh Rusia, menyatakan bahwa Eropa tidak boleh membiarkan tindakan militer yang melanggar hukum internasional ini terlepas dari respon tegas pemimpin dunia, termasuk Eropa (Rinke dan Marsh 2022). Pernyataan Merkel menegaskan pentingnya menegakkan prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional, serta menolak segala bentuk ekspansi wilayah terutama melalui kekerasan. Mearsheimer dan Rosato menjelaskan dalam bukunya bahwa rasionalitas individu tidak semata hanya mengacu pada hasil akhir dalam bentuk kebijakan, tetapi juga mencerminkan bagaimana seorang individu atau aktor memproses informasi dan menilai situasi global. Tindakan Rusia dapat dimaknai sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional yang menunjukkan sikap Merkel dalam merespon fenomena tersebut tidak secara spontan, melainkan melalui kerangka berpikir yang mempertimbangkan prinsip fundamental dalam hubungan internasional. Rasionalitas individu memiliki peran penting sebagai sebuah fondasi bagi para pemimpin negara untuk memetakan fenomena kompleks dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Merkel juga menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa keputusan yang diambil selama Merkel menjabat sebagai Kanselir dan menjalin kerjasama dengan Vladimir Putin, Merkel tidak pernah bersikap naif (Walsh dan Goldenberg 2022). *“Diplomacy isn't wrong just because it hasn't worked”*. Merkel menyatakan bahwa diplomasi tidak salah hanya karena upaya diplomasi tersebut tidak berhasil (Walsh dan Goldenberg 2022). Hal ini menunjukkan sikap Merkel yang tetap percaya pada pentingnya upaya diplomatik meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Pernyataan ini selaras dengan rasionalitas individu, menunjukkan bahwa Merkel sebagai pemangku kebijakan dapat mengevaluasi situasi secara kritis, mempertimbangkan sejumlah faktor dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang mendalam. Merkel menyadari bahwa dalam hubungan internasional, terutama dengan aktor yang memiliki tendensi untuk menggunakan kekuatan militer upaya diplomatik tidak selalu efektif. Dalam hal ini, Merkel menunjukkan sikap rasional untuk menghadapi tantangan yang timbul oleh sikap Rusia.

### 2.2.2 *Scholz Rationality*

*“Today, Germany stands with the Ukrainian people. Our thoughts and sympathy goes out today to the victims of the Russian war”* (Bundesregierung 2022). Pernyataan ini menjadi fokus utama dalam pidato Olaf Scholz di *Bundestag* pada 27 Februari 2022, menunjukkan respon langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Scholz menegaskan komitmen Jerman untuk mendukung Ukraina dan menolak agresi yang dilakukan oleh Rusia. Pernyataan Scholz ini lebih dari sekedar ungkapan untuk menunjukkan solidaritas, tetapi merupakan pernyataan politik yang mencerminkan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri Jerman. Jerman yang dikenal sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang pasif dan

berdasarkan diplomasi serta kerjasama mengalami perubahan, Scholz menyampaikan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu Ukraina, bantuan ini datang dalam berbagai bentuk mulai dari bantuan kemanusiaan dan militer (Stratievski 2025).

Pernyataan Scholz menunjukkan pemahaman terhadap urgensi situasi dan pentingnya memberikan dukungan kepada Ukraina yang sedang berada dibawah ancaman Rusia. Dapat dilihat bahwa Scholz tidak hanya merespon terhadap agresi Rusia berdasarkan emosi, namun dengan adanya analisis mendalam mengenai konsekuensi dari tindakan dan aksi oleh Rusia. Scholz berpendapat bahwa agresi tanpa respon dapat mengarah pada ketidakstabilan kekuasaan di Eropa dan dapat merusak tatanan internasional yang sudah ada (Kinkartz 2022). Dalam hal ini, Scholz menegaskan bahwa Jerman tidak akan tinggal diam dan akan berusaha untuk melindungi nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Scholz menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi agresi Rusia. Dengan menggandeng negara-negara lain untuk bersatu dan memberikan dukungan kepada Ukraina, hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan ini bukan hanya menjadi sebuah masalah regional, tetapi Scholz menganggap bahwa hal tersebut memerlukan kerjasama internasional.

*“It must be clearly stated that this war is Putin’s war ... Putin, not the Russian people, has decided to start this war”* (Bundesregierung 2022). Dalam pidato ini, Scholz menyampaikan bahwa tindakan Rusia yang memutuskan untuk melakukan invasi terhadap Ukraina merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Scholz menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibiarkan dan Rusia harus menanggung konsekuensi atas tindakan tersebut. Salah satu

konsekuensi yang dimaksud dalam pidato Scholz tersebut adalah penangguhan izin gas pipa *Nord Stream 2* yang menjadi kerja sama antara Rusia dan Jerman. Scholz menyampaikan pentingnya untuk mengatasi tekanan ekonomi dan energi demi mempertahankan kredibilitas politik luar negeri Jerman. Meskipun keputusan Scholz tersebut mengandung risiko politik dan ekonomi, Scholz menilai bahwa mempertahankan hubungan energi dengan Rusia yang melanggar hukum internasional dapat menurunkan posisi strategis Jerman dalam keamanan kolektif Eropa. Scholz mengutamakan pentingnya bertindak rasional dengan mempertahankan kepentingan jangka panjang negara.

*“We are living through a watershed era... whether we permit Putin to turn back the clock... or whether we have it in us to keep warmongers like Putin in check. That requires strength of our own”* (Bundesregierung 2022). Scholz menyampaikan dalam sidang Bundestag yang menandai titik balik dalam orientasi kebijakan luar negeri Jerman. Dalam pidatonya, Scholz menyatakan bahwa dunia sedang memasuki era baru dan Jerman harus memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas Eropa dari Vladimir Putin. Pernyataan ini tidak hanya bersifat simbolik, namun mencerminkan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis dari seorang pemimpin negara. Scholz sadar bahwa invasi Rusia tidak dapat direspons melalui strategi yang sama ketika Rusia memutuskan untuk melakukan aneksasi terhadap Krimea pada tahun 2014. Oleh karena itu, Scholz mengusulkan perubahan besar dalam struktur pertahanan Jerman, termasuk alokasi dana khusus sebesar €100 miliar euro dan komitmen untuk memenuhi target pengeluaran pertahanan NATO sebesar 2% dari PDB (Sheahan dan Marsh 2022).

*Individual Rationality* yang tercermin dari tindakan Scholz dapat dilihat melalui kemampuannya untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan nasional dan merancang respon kebijakan yang sepadan. Scholz mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pertimbangan strategis dalam menghadapi sebuah ancaman.

Dengan demikian, pernyataan Scholz tidak hanya mencerminkan komitmen Jerman, tetapi juga menunjukkan pendekatan yang rasional dan strategis dalam menghadapi permasalahan yang kompleks. Scholz menunjukkan seberapa besar kepentingan jangka panjang Jerman dan stabilitas Eropa, hal ini selaras dengan konsep Mearsheimer dan Rosato tentang rasionalitas.

### ***2.3 Collective Rationality***

*Collective Rationality* merupakan konsep penting dalam buku Mearsheimer dan Rosato. Konsep ini memaparkan bahwa negara sebagai aktor dalam sistem internasional menentukan keputusan kebijakan luar negeri melalui hasil proses kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan cara berdialog dan bertukar informasi. *Collective Rationality* menekankan seberapa pentingnya proses deliberatif yang berisi diskusi dari berbagai pemangku kebijakan untuk memilih berbagai opsi dan menganalisis dampak yang mungkin terjadi sebelum mencapai sebuah kesepakatan.

Dalam studi kasus Jerman, Scholz tidak bertindak dan mengambil keputusan sendiri. Namun, melibatkan sejumlah kementerian, ahli militer dan legislator untuk mengevaluasi ancaman dan menentukan langkah terbaik untuk mencapai tujuan negara Jerman. Proses deliberatif ini menuntut konsensus dan

kompromi, sehingga kebijakan final yang dihasilkan tidak mencerminkan pandangan dari satu pihak, melainkan mencerminkan kepentingan bersama melalui hasil negosiasi. Keputusan kolektif biasanya memiliki legitimasi yang lebih kuat karena hal ini melibatkan berbagai suara dan memperhitungkan berbagai perspektif pemangku kebijakan. Pendekatan ini dapat membantu untuk mengurangi adanya risiko bias dan kesalahan yang dapat terjadi ketika sebuah keputusan diambil secara individual tanpa adanya evaluasi yang komprehensif.

### *2.3.1 Bundestag*

Bundestag memiliki fungsi utama sebagai pilar fundamental dalam pengambilan keputusan kebijakan di Jerman (Deutscher Bundestag, t.t.). Sebagai sebuah lembaga legislatif, Bundestag tidak hanya mewakili suara rakyat, tetapi juga memiliki peran sebagai sebuah arena deliberatif untuk memperdebatkan berbagai ide dan perspektif yang dapat diuji. Ketika Jerman menghadapi tantangan besar seperti invasi Rusia terhadap Ukraina, Bundestag menjadi tempat untuk mendiskusikan dan mengevaluasi ulang kebijakan luar negeri Jerman secara mendalam (Deutscher Bundestag, t.t.).

Melalui sidang dan komite, berbagai anggota parlemen dari berbagai partai politik berkolaborasi untuk mengevaluasi berbagai opsi yang ada dalam mempertimbangkan adanya risiko dan manfaat, dan mencari konsensus yang bisa diterima oleh berbagai pihak (Deutscher Bundestag, t.t.). Keberadaan Bundestag tidak hanya untuk meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil semata, tetapi memastikan bahwa keputusan dari hasil diskusi tersebut mencerminkan kepentingan dan nilai masyarakat Jerman (Deutscher Bundestag, t.t.).

Bundestag menyelenggarakan 19 diskusi dan 30 usulan dari 2 tahun pertama invasi Rusia terhadap Ukraina dengan dukungan penuh dari koalisi partai SPD, Hijau, dan FDP sebagai faksi oposisi terbesar di Jerman (Mello 2025). Meskipun partai-partai tersebut memiliki perbedaan pandangan terkait invasi Rusia terhadap Ukraina, mereka tetap berusaha untuk mencapai sebuah konsensus melalui dialog dan negosiasi dalam Bundestag. Misalnya, Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau yang cenderung mendukung pendekatan yang proaktif dalam memberikan bantuan militer kepada Ukraina (Fürstenau 2022). Di sisi lain, Partai Kiri lebih skeptis terhadap penggunaan kekuatan dan memilih untuk menggunakan pendekatan diplomatik (Deutscher Bundestag 2022). Partai Liberal (FDP) dan Partai Kristen Demokrat (CDU) mendukung untuk menindak tegas Rusia, tetapi dengan tujuan utama untuk memperkuat pertahanan Jerman (Deutscher Bundestag 2022).

**Tabel 1. Germany Party Policies Contestation**

<i>No</i>	<i>Parties</i>	<i>Policies</i>
1	SPD	Surplus budget Bundeswehr sebesar 100 miliar euro dan bantuan militer ke Ukraina.
2	FDP	Menekankan pentingnya diplomasi.
3	CDU/CSU	Pengiriman persenjataan berat ke Ukraina dan meningkatkan pertahanan Jerman.
4	Greens	Transformasi energi untuk meninggalkan ketergantungan energi pada Rusia.
5	The Left	Menekankan diplomasi, penolakan intervensi militer.

Sumber: Mello (2025).

Terdapat perbedaan pendekatan dan pandangan yang signifikan dalam parlemen Jerman, isu invasi Rusia telah mendorong berbagai partai tersebut untuk mencapai sebuah konsensus dalam tujuan menentang agresi Rusia. Dalam situasi ini, berbagai partai tersebut menyadari urgensi persatuan untuk menjaga stabilitas

dan keamanan nasional Jerman. Melalui perundingan dan dialog, berbagai partai tersebut mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan yang mencerminkan adanya kesepakatan bersama. Proses perundingan dan pencapaiannya terhadap sebuah konsensus mencerminkan adanya *collective rationality*. Menjelaskan bagaimana berbagai partai dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda berusaha untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan kepentingan dalam merumuskan sebuah kebijakan yang efektif sebagai sebuah respon terhadap ancaman keamanan nasional Jerman oleh Rusia.

Dalam konteks ini, Bundestag mendukung konsep Mearsheimer dan Rosato bahwa sebuah negara tidak berpikir sebagai individu, melainkan melalui kompleksitas institusional. Keputusan akhir mengenai fenomena invasi Rusia terhadap Ukraina bukan menjadi hasil perhitungan Scholz sendiri, melainkan menjadi sebuah produk dari interaksi antara eksekutif-legislatif, dinamika antara koalisi pemerintahan, pertimbangan birokrasi dan pengaruh tekanan oposisi. Implikasi teoritis dari analisis tersebut menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri harus bergeser dari model *unitary actor* menuju pendekatan yang lebih holistik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perdebatan yang ada dalam Bundestag, bagaimana dalam sebuah krisis keputusan negara selalu menjadi hasil negosiasi antara logika, keamanan, ekonomi, politik domestik, dan norma internasional.

### 2.3.2 *The Think Tanks*

Dalam konteks kebijakan luar negeri Jerman, *Think Tank* memiliki peran penting dalam mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan analisis, pertimbangan multidimensi, dan kolaborasi dengan pemangku kebijakan. *Think Tank* memiliki fungsi utama sebagai sebuah penghubung antara komunitas ilmiah,

pembuat kebijakan, dan berkontribusi terhadap kualitas deliberasi kebijakan dengan menyediakan data, model kebijakan, serta evaluasi konsekuensi terhadap kebijakan yang akan diambil.

Salah satu contoh *Think Tank* yang menonjol dalam memberikan saran kebijakan Jerman adalah *Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)*, atau *German Institute for International Affairs*. Lembaga tersebut berfungsi secara independen dan memiliki tujuan utama untuk memberikan saran kebijakan yang memiliki basis penelitian kepada pemerintah federal, terutama dalam isu strategis seperti keamanan Eropa serta dinamika politik (*Stiftung Wissenschaft und Politik, t.t.*). *Think Tanks* bekerja berdasarkan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) menekankan pentingnya data empiris dan analisis risiko strategis. Dalam konteks penyusunan kebijakan luar negeri Jerman, SWP tidak hanya bertindak sebagai pengamat, tetapi juga berkontribusi terhadap ekosistem kebijakan Jerman.

Selain *Stiftung Wissenschaft und Politik*, *Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)* atau *German Council on Foreign Relations*. Berbeda dengan SWP, DGAP memiliki peran sebagai sebuah lembaga riset kebijakan luar negeri Jerman. DGAP menjadi ruang deliberatif untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, dan jurnalis. Melalui penelitian dan diskusi strategis yang dilakukan secara terbuka, DGAP memainkan peran penting dalam menguatkan proses *collective rationality*. Hal ini terjadi karena keputusan kebijakan tidak hanya bertumpu pada satu aktor individual politik, tetapi berdasarkan pada pertimbangan analitis dengan berbagai pihak.

Sama seperti SWP, peran DGAP dalam konteks *collective rationality* adalah menyediakan analisis dan rekomendasi berbasis fakta dan data empiris. DGAP

seringkali menerbitkan berbagai laporan strategis, *policy briefs*, dan jurnal ilmiah yang membahas isu-isu mengenai kebijakan luar negeri Jerman serta hubungan Jerman dengan Rusia pasca invasi Rusia terhadap Ukraina. Laporan strategis tersebut bukan sekedar jurnal akademis yang diterbitkan, namun digunakan untuk memberi arah dan opsi konkret bagi para pembuat kebijakan. Seperti pada tahun 2022, DGAP menerbitkan laporan yang berjudul “*The turning point in Germany: The Consequences of Ukraine War in Germany*” (“Die Zeitenwende in Deutschland,” t.t.). Menjelaskan perubahan paradigma kebijakan luar negeri Jerman merupakan dampak dari agresi Rusia terhadap Ukraina.

Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, DGAP secara aktif mengadvokasikan perlunya transisi paradigma dalam kebijakan luar negeri Jerman. Berubah dari pendekatan yang selama ini memiliki sifat pragmatis dan diplomatis terhadap Rusia menjadi pendekatan yang berbasis keamanan (Meister 2022). Secara keseluruhan, kontribusi DGAP sebagai *think tank* terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Jerman menunjukkan bagaimana *collective rationality* terbentuk melalui institusi yang menghubungkan antara analisis ilmiah dengan pertimbangan kebijakan.

Terlebih, keberadaan *think tank* seperti SWP dan DGAP memperluas cakupan kolektivitas dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh keterlibatan aktor non-negara dalam proses rasionalisasi kebijakan terutama di Jerman. SWP dan DGAP mendukung proses deliberatif Jerman dengan menyediakan informasi, analisis, dan sebuah forum deliberasi yang ditujukan untuk mendiskusikan opsi kebijakan luar negeri yang berdasarkan informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *think tank* memiliki kontribusi signifikan

terhadap *collective rationality* dalam sistem kebijakan luar negeri Jerman. Melalui analisis yang memiliki basis data empiris, kredibilitas ilmiah, dan partisipasi aktif, *think tank* membantu memastikan bahwa keputusan kebijakan strategis negara tidak hanya bersifat reaktif.

### 2.3.3 *Bundessicherheitsrat*

Dalam kerangka pembentukan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Jerman, *Bundessicherheitsrat* atau BSR memiliki peran sebagai sebuah forum pengambilan keputusan tingkat tinggi (Bundeszentrale für politische Bildung, t.t.). Selain itu, *Bundessicherheitsrat* memiliki peran dalam merumuskan berbagai kebijakan penting seperti ekspor senjata, respon terhadap ancaman internasional, dan kebijakan pertahanan (Bundeszentrale für politische Bildung, t.t.).

*Bundessicherheitsrat* terdiri dari Kanselir Jerman sebagai pemimpin, bersama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri dalam Negeri, Menteri Ekonomi, serta perwakilan dari *Bundesnachrichtendienst* sebagai lembaga intelijen Jerman (Bundeszentrale für politische Bildung, t.t.). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam dewan ini merupakan hasil dari kolaborasi *multi-level* yang memiliki perbedaan perspektif. Hal ini menunjukkan bahwa proses deliberasi yang berlangsung dalam dewan *Bundessicherheitsrat* tersebut menggambarkan praktik langsung dari *collective rationality*. Keputusan yang diambil dari dalam dewan tersebut tidak terjadi sepihak, tetapi melalui pertimbangan yang didasarkan pada informasi intelijen, analisis strategis, dan implikasi jangka panjang terhadap kepentingan nasional Jerman.

Dalam laporan *Bundeszentrale für politische Bildung*, dijelaskan bahwa *Bundessicherheitsrat* bersifat non-publik dan selektif dalam mengungkapkan hasil dari

pertemuannya (Bundeszentrale für politische Bildung, t.t.). Namun, keberadaan *Bundessicherheitsrat* diakui sebagai lembaga strategis yang menjaga konsistensi dan keterhubungan kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan Jerman. Dalam meningkatnya ketegangan internasional, *Bundessicherheitsrat* memiliki fungsi sebagai sebuah ruang deliberasi untuk mengidentifikasi proyeksi ancaman, kebutuhan militer, dan menganalisis tekanan internasional secara komprehensif sebelum penetapan kebijakan. *Bundessicherheitsrat* mewujudkan berbagai perhitungan strategis melalui prosedur birokratik yang tertutup.

Dengan demikian, kontribusi *Bundessicherheitsrat* sebagai wadah pengambilan keputusan strategis menunjukkan bahwa *collective rationality* tidak hanya terjadi di ranah legislatif seperti *Bundestag*, tetapi juga dalam ranah eksekutif pemerintahan (Bundeszentrale für politische Bildung, t.t.). Mekanisme kerja *Bundessicherheitsrat* yang berbasis pada koordinasi antar kementerian menegaskan bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan Jerman dirumuskan tidak hanya pada kepemimpinan individual, namun melalui konsensus institusional yang rasional dan deliberatif.

## BAB 3

### ***DELIBERATIVE PROCESS* DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN JERMAN TERHADAP RUSIA PADA INVASI UKRAINA**

Bab ini membahas analisis proses perubahan kebijakan luar negeri Jerman menggunakan teori Mearsheimer dan Rosato dalam bukunya *How States Think* terhadap perubahan kebijakan Jerman terhadap Rusia pasca-invasi Ukraina di tahun 2022-2023. Teori Mearsheimer dan Rosato memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami perilaku negara dalam konteks sistem internasional yang anarkis. Penerapan teori ini dalam konteks kebijakan luar negeri Jerman akan dilakukan dengan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan Jerman dalam merespon agresi Rusia. Pendekatan ini akan menjelaskan bagaimana Jerman melakukan analisis situasi, perhitungan biaya dan manfaat, serta proses Jerman sebagai sebuah negara merumuskan strategi jangka panjang yang mencerminkan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Secara khusus bab ketiga akan mengkaji penerapan proses deliberatif dalam kerangka teori John J. Mearsheimer dan Sebastian Rosato.

#### ***3.1 Deliberative Process***

Proses deliberatif memiliki peran penting sebagai sebuah jembatan menuju *rational foreign policy* (Mearsheimer dan Rosato 2023, 37). Mearsheimer dan Rosato menganggap bahwa penggunaan *credible theory* yang mencakup asumsi, logika kausal, dan bukti empiris merupakan fondasi penting dalam proses deliberatif untuk mencapai rasionalitas kebijakan luar negeri (Mearsheimer dan Rosato 2023, 68). Negara dapat dianggap rasional apabila strateginya berdasarkan

teori kredibel dan merupakan hasil deliberatif yang kuat (Mearsheimer dan Rosato 2023, 68). Deliberasi memastikan bahwa keputusan sebuah negara tidak bersifat impulsif atau berdasarkan pangangan sepihak, melainkan terbentuk melalui debat yang kuat di antara para pembuat kebijakan. Dalam kerangka ini, pandangan dan analisis dari aktor utama dalam pemerintahan dikumpulkan, diuji, dan disintesis untuk menghasilkan strategi kebijakan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dijelaskan oleh John Mearsheimer dan Sebastian Rosato, negara yang bertindak rasional tidak memiliki sifat impulsif atau berdasarkan persepsi sepihak, tetapi didasari dengan dialog, debat, dan evaluasi bersama yang menghasilkan keputusan kolektif guna menghadapi tantangan eksternal (Mearsheimer dan Rosato 2023, 22).

Sebaliknya, negara yang tidak rasional merupakan negara yang mengambil kebijakan tanpa adanya dukungan teori yang kredibel dan mengabaikan proses deliberasi (Mearsheimer dan Rosato 2023, 37). Keputusan yang dihasilkan dari ketiadaan dua hal tersebut cenderung tidak konsisten dan tidak responsif terhadap dinamika internasional serta memiliki potensi kegagalan dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini menjadikan proses deliberatif berada di bagian inti dari sistem politik Jerman yang menjadi sebuah fondasi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, khususnya dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Melalui *collective rationality* proses deliberatif tidak hanya menjadi sebuah forum diskusi biasa, tetapi menjadi sebuah sistem yang terinstitusionalisasi untuk memastikan keputusan strategis negara dihasilkan melalui proses pertukaran argumentasi yang rasional antara berbagai pemangku kepentingan. Proses ini terlihat jelas dalam *traffic light* koalisi Jerman yang merespon terhadap krisis Ukraina dengan cara membangun

sebuah mekanisme deliberasi *multi-level* yang mencakup parlemen, birokrasi, dan intra-koalisi.

Mearsheimer dan Rosato menekankan fungsi utama dari adanya proses deliberatif sebagai filter kognitif yang penting untuk mengurangi adanya bias kognitif pada pengambilan keputusan individual (Mearsheimer dan Rosato 2023, 101). Hal ini memberikan peranan penting bagi Bundestag sebagai arena deliberasi. Dalam Bundestag, berbagai partai politik yang memiliki perbedaan pandangan ikut terlibat dalam proses ini.

Dalam proses deliberasi ini, peneliti akan menjelaskan mengenai dinamika antar aktor yang terlibat dengan masing-masing peran. Kanselir Olaf Scholz sebagai kepala pemerintahan merupakan aktor kunci dan *ultimate decider* dalam proses ini. Bundestag memiliki fungsi sebagai arena deliberatif dalam pengambilan keputusan kebijakan Jerman, peran Bundestag mencakup; forum debat dan konsensus, meningkatkan legitimasi kebijakan, wadah untuk memproses mosi serta resolusi antar partai. Kemudian ada beberapa partai politik yang hadir dalam sidang darurat pada tanggal 27 Februari 2022 seperti SPD yang mendukung peningkatan anggaran, Hijau mendukung transformasi energi, FDP menekankan pentingnya langkah diplomasi, CDU/CSU mengusulkan bahwa penting untuk mengambil langkah tegas seperti mengirimkan persenjataan Jerman ke Ukraina, Kiri yang menolak pengiriman persenjataan dan menekankan diplomasi.

Kemudian BND dan BSR memiliki peran utama sebagai fondasi Jerman dalam analisis informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait keamanan nasional dan kepentingannya luar negeri Jerman, memberikan opsi

kebijakan, serta memperingatkan Jerman mengenai ancaman Rusia. BSR memiliki tanggung jawab atas ekspor senjata Jerman dan kebijakan pertahanan Jerman.

SWP dan DGAP sebagai *Think Tank* Jerman memiliki peran utama untuk menyediakan analisis ilmiah dan rekomendasi berbasis data empiris. *Think Tank* hadir dalam Bundestag untuk memberikan pandangan akademisi Jerman kepada pembuat kebijakan mengenai opsi kebijakan luar negeri yang perlu diambil.

## **3.2 The Process**

### *3.2.1 Discussion and the Debate*

Sebelum diskusi dimulai berbagai aktor yang hadir dalam proses deliberatif Jerman berangkat melalui asumsi yang sama mengenai ancaman Rusia terhadap tatanan keamanan internasional Eropa. Masing-masing aktor percaya bahwa apabila Rusia dibiarkan untuk meneruskan agresinya terhadap Ukraina, maka tatanan keamanan internasional Eropa akan terancam. Kemudian para aktor menggunakan bukti empiris seperti respon Jerman pada tahun 2014 ketika Rusia memutuskan untuk menganeksasi Krimea yang menjadi bagian wilayah Ukraina. Pada tahun itu, Jerman memberikan respon dalam bentuk sanksi terhadap Rusia, namun masih percaya bahwa konsep *wandel durch handel* yang menjaga kerjasama Jerman dengan Rusia melalui *Nord Stream 2* merupakan langkah yang tepat untuk mencegah keberlanjutan konflik. Dengan demikian, integrasi *credible theories* dalam proses deliberatif Jerman di Bundestag memastikan bahwa keputusan negara tidak spontan, melainkan produk dari proses deliberatif yang terstruktur dan pemikiran kompleks seorang individu yang rasional.

Dalam merespons invasi Rusia ke Ukraina, diskusi menjadi tahap pertama bagi Jerman. Beberapa bulan awal setelah invasi Rusia, pemerintahan Jerman menghadapi sebuah tantangan besar dalam menginterpretasikan dimensi ancaman yang muncul. Mulai dari implikasi keamanan langsung hingga dampak ekonomi dan politik jangka panjang. Proses ini berlangsung melalui mekanisme kelembagaan yang saling berinteraksi, analisis fase ini mengungkap bagaimana sebuah negara demokratis seperti Jerman menghadapi krisis keamanan melalui pendekatan *multi-level* yang melibatkan berbagai aktor institusional dalam membangun pemahaman bersama tentang ancaman yang dihadapi dan opsi kebijakan yang tersedia.

*Bundesnachrichtendienst* (BND) menjadi fondasi utama dalam fase ini. *Bundesnachrichtendienst* atau BND merupakan badan intelijen luar negeri Jerman yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi intelijen yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kepentingan luar negeri Jerman (“What We Do | BND,” t.t.). BND berfungsi sebagai sebuah lembaga vital dalam menjaga keamanan negara, memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik dan militer, serta mendukung kebijakan luar negeri Jerman (“What We Do | BND,” t.t.). Selain itu, *Bundesnachrichtendienst* memiliki peran sebagai penyedia informasi untuk memberikan opsi kebijakan bersama dengan *Bundessicherheitsrat*.

BND sempat menyampaikan peringatan mengenai gerakan Rusia yang kian menunjukkan niatnya untuk melancarkan invasi terhadap Ukraina (Michaels 2024). Namun, Jerman tidak melihat realita dari politik Rusia dan gagal untuk melihat tujuan utama dari Rusia (Michaels 2024). Rusia memanfaatkan keuntungan dalam

permainan geopolitik tersebut dan mengutamakan tujuan utamanya terhadap Ukraina untuk mempertahankan serta memperluas lingkup pengaruhnya (Michaels 2024). Pada intinya, BND membuat beberapa analisis khusus untuk memetakan berbagai skenario krisis yang tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga memperhitungkan dampak ekonomi global. Berbagai laporan dari BND tidak berhenti di tingkat eksekutif, melainkan dikirimkan kepada berbagai komite terkait di Bundestag untuk diverifikasi dan didiskusikan. Hal ini bertujuan agar informasi intelijen dari BND tersebut tidak dimonopoli oleh kalangan eksekutif, tetapi menjadi sebuah bahan pertimbangan kolektif melalui mekanisme parlemen.

Selain *Bundesnachrichtendienst*, *Stiftung Wissenschaft und Politik* dan *Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik* sebagai *Think Tank* Jerman memiliki peran signifikan dalam memperkuat proses deliberatif dengan cara memberikan nasihat kebijakan kepada pimpinan *Bundestag* serta kementerian terkait. *Stiftung Wissenschaft und Politik* dan *Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik* menjalankan fungsi penting sebagai penyedia analisis ilmiah dan rekomendasi berbasis data empiris yang kredibel. *Stiftung Wissenschaft und Politik* dan *Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik* melakukan berbagai hal tersebut dengan membuat publikasi studi kebijakan seperti *Zeitenwende: Germany's Strategic Shift in Foreign Policy* serta "*The turning point in Germany: The Consequences of Ukraine War in Germany*" (Bilal 2024). Dalam beberapa artikel tersebut SWP dan DGAP memberikan kajian strategis mengenai posisi Jerman dalam tatanan keamanan Eropa yang terganggu akibat agresi Rusia terhadap Ukraina. Analisis tersebut tidak hanya memetakan risiko geopolitik yang dihadapi oleh Jerman, tetapi

merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh Jerman untuk merespons tantangan tersebut secara rasional.

Lebih lanjut, kontribusi SWP dan DGAP tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk narasi kebijakan luar negeri Jerman di tingkat internasional. Melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti EUISS, SWP dan DGAP ikut mempromosikan posisi Jerman sebagai aktor rasional dalam tatanan global (Nicolai von 2025). Dengan demikian, SWP memiliki fungsi sebagai salah satu kunci dalam proses deliberatif Jerman.

Tanggal 27 Februari 2022 menandakan peran Bundestag yang menjadi arena deliberasi utama yang terlihat jelas dalam sidang pleno darurat. Sidang ini memperlihatkan bagaimana mekanisme deliberatif parlementer bekerja dalam sebuah pemerintahan yang sedang menghadapi krisis. Sesi dalam Bundestag tersebut diadakan atas permintaan langsung dari Kanselir Olaf Scholz yang dihadiri berbagai partai seperti SPD, CDU/CSU, Partai Hijau, FDP, dan Partai Kiri dalam forum deliberasi Jerman, Bundestag (Deutscher Bundestag 2022). Sidang ini dilakukan di hari minggu pada tanggal 27 Februari 2022 yang dibuka dengan pidato Kanselir Olaf Scholz melalui pidato *Zeitenwende*-nya, mengumumkan perubahan drastis dari kebijakan pertahanan termasuk alokasi dana khusus sebesar 100 miliar Euro (Ulatowski 2024). Istilah *Zeitenwende* ini muncul 3 hari setelah invasi Rusia terhadap Ukraina, Kanselir Olaf Scholz menjelaskan bahwa fenomena tersebut menandakan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Jerman terutama terhadap Rusia (Blumenau 2022). *Zeitenwende* ini juga digunakan oleh Olaf Scholz untuk mengecam tindakan Rusia dan menyuarakan simpati Jerman terhadap penderitaan rakyat Ukraina (Blumenau 2022).

Proses deliberatif dalam Bundestag dimulai dengan presentasi informasi dan analisis oleh BND yang telah mengumpulkan serta memberikan gambaran ancaman yang ditimbulkan oleh invasi Rusia. Informasi ini menjadi dasar bagi para anggota parlemen dalam Bundestag untuk memahami konteks dan urgensi situasi yang sedang dihadapi oleh Jerman.

Setelah Scholz menyelesaikan pidatonya, berbagai anggota parlemen Bundestag dari berbagai fraksi politik memberikan tanggapan. Fraksi SPD sebagai pendukung utama Scholz setuju dengan langkah-langkah yang diusulkan oleh Scholz (Deutscher Bundestag 2022). Hal tersebut dapat dilihat setelah Scholz memberikan pidatonya koalisi partai Scholz seperti SPD bertepuk tangan dan menyerukan *“Your Excellency, our thoughts are with you who is defending freedom and democracy these days”* (Deutscher Bundestag 2022). Kemudian, setelah itu seluruh anggota Bundestag ikut berdiri dan bertepuk tangan (Deutscher Bundestag 2022). Kemudian, meskipun Partai Hijau merupakan bagian dari salah satu partai koalisi partai ini tidak setuju dengan pernyataan Scholz mengenai kenaikan anggaran militer sebesar 100 miliar euro dalam pidatonya. Dapat dilihat dalam pernyataan menanggapi hal tersebut seperti *“If you want it the way you’re proposing it here this morning, then we can talk about it, Mr. Chancellor But a special fund isn’t just a fund; a special fund means new debt”* (Deutscher Bundestag 2022). Selain itu, Partai Hijau justru menyebutkan bahwa alih-alih meningkatkan anggaran, Jerman perlu untuk meningkatkan solidaritas Eropa dan segera melakukan transformasi energi untuk meninggalkan ketergantungan energi dari Rusia melalui pembekuan proyek *Nord Stream 2* (Deutscher Bundestag 2022). Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Partai Hijau yang mengatakan

bahwa “*Your Excellency, it’s good to invest in military security, but let us be clear at this point energy supply and energy sovereignty have also become a matter of national security. We will have to invest in this as well*” (Deutscher Bundestag 2022).

Proyek *Nord Stream 2* semula dirancang untuk memperkuat kerjasama energi antara Jerman dan Rusia, tetapi seiring meningkatnya ancaman dari Rusia proyek tersebut menjadi sebuah perdebatan dalam kalangan pemangku kebijakan Jerman. Di sisi lain, CDU/CSU sebagai oposisi mendesak pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih tegas seperti mengirimkan sebagian persenjataan Jerman ke Ukraina (Deutscher Bundestag 2022). Hal tersebut terlihat dari pernyataan partai CDU/CSU seperti “*Mr. Chancellor, thank you for your speech here this morning, and for having conducted intensive discussions on this topic, including the question of how to deal with arms deliveries from several European countries to Ukraine, Enough is enough*” (Deutscher Bundestag 2022). Hal tersebut sempat dianggap tidak lazim karena Jerman memiliki sejarah terkait dengan perang dan kekerasan, terutama setelah Perang Dunia 2. Sejarah tersebut menyebabkan Jerman cenderung bersikap pasifis dan menolak keterlibatan militer terutama dengan doktrin politik *Grundgesetz*.

Namun, setelah sidang pleno, kebijakan *Zeitenwende* menjadi sebuah langkah krusial untuk menanggapi invasi Rusia. Peningkatan anggaran dan pengiriman senjata ke Ukraina mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan luar negeri Jerman yang ditandai dengan dikenalnya Jerman yang selalu berhati-hati dan cenderung memiliki kebijakan ketat dalam penggunaan kekuatan militer (Atlantic Council Experts 2022). Keputusan ini menunjukkan proses

deliberatif yang terjadi dalam Bundestag berhasil menghasilkan konsensus meskipun berbagai partai memiliki perbedaan pandangan. Proses ini menciptakan legitimasi bagi keputusan yang diambil, memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan dari satu individu, tetapi didasari oleh dukungan dari berbagai fraksi politik.

### 3.2.2 *Reaching Consensus*

Dalam mencapai sebuah konsensus dalam merespon invasi Rusia ke Ukraina, khususnya terkait dengan *Zeitenwende* merupakan proses kompleks yang melibatkan negosiasi intensif di berbagai partai dalam koalisi pemerintahan. Berbagai koalisi harus berhadapan dengan tantangan besar dalam merumuskan sebuah kebijakan yang tidak hanya efektif dalam menghadapi ancaman, tetapi dapat diterima oleh berbagai pihak yang ikut terlibat. Salah satu faktor utama formulasi kebijakan ini adalah negosiasi koalisi mengenai kebijakan *Zeitenwende* yang menandai perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan Jerman, termasuk peningkatan anggaran militer dan pengiriman senjata ke Ukraina. Negosiasi ini tidak hanya melibatkan diskusi tentang pengiriman senjata, tetapi tentang bagaimana Jerman dapat berkontribusi kepada keamanan NATO dan Uni Eropa.

Kontroversi mengenai pengiriman senjata berat ke Ukraina menjadi isu utama dalam fase formulasi kebijakan ini. Meskipun ada konsensus dari berbagai partai yang setuju bahwa Jerman harus mendukung Ukraina, terdapat perdebatan mengenai jenis dukungan yang harus diberikan. Beberapa anggota koalisi dari SPD dan Hijau mendukung pengiriman senjata berat seperti tank Leopard 2 buatan Jerman (Knight 2023). Hal tersebut dapat dilihat ketika Scholz memberikan pidatonya "*Germany will supply Ukraine with weapons made for its defense*" yang

dilanjutkan dengan tepuk tangan dari Partai Hijau, FDP, dan partai Kiri. Namun, ada kekhawatiran mengenai pengiriman senjata berat yang dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko konflik yang lebih luas, terutama dengan Rusia. Selain itu, Jerman memiliki kebijakan yang membatasi ekspor senjata ke zona konflik. 58% dari masyarakat Jerman awalnya ikut menentang pengiriman senjata berat ke Ukraina, mencerminkan sikap publik yang masih dipengaruhi oleh memori kolektif tentang perang (Fürstenau 2022).

FDP sebagai partai yang lebih moderat menekankan pentingnya diplomasi dan dialog (Deutscher Bundestag 2022). Partai tersebut berpendapat bahwa pengiriman senjata berat harus dipertimbangkan mengingat potensi dampak negatif terhadap stabilitas regional. Seperti dalam pernyataan partai FDP *“What does this mean for the future? We will not refuse talks with Russia, even in this extreme situation, it is the task of diplomacy to keep channels of communication open”* (Deutscher Bundestag 2022). Dalam konteks ini, FDP menjadi penengah dan penyeimbang dalam koalisi, mendorong diskusi tentang konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dengan mengutamakan pentingnya diplomasi dengan Rusia (Deutscher Bundestag 2022). Dengan demikian, peran FDP dalam proses ini krusial untuk menjaga keseimbangan dalam koalisi dalam mengusulkan berbagai opsi kebijakan.

Di antara para aktor birokrat, BND sebagai Dewan Keamanan Federal Jerman memiliki peranan yang penting. Selain untuk mengidentifikasi ancaman yang ada terhadap kepentingan Jerman, BND dibawah *Bundessicherheitsrat* memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan keamanan dan pengendalian senjata, BND juga memiliki otoritas dalam hal ekspor militer

yang bersifat sensitif (Bundes-nachrichtendienst 2025). Meskipun deliberasi yang dilakukan dalam BSR bersifat rahasia dan rincian pertemuannya tidak dipublikasikan, peran institusional BND dalam pengambilan keputusan mengenai ekspor senjata tetap sangat signifikan. Keberadaan Dewan Keamanan Federal menunjukkan pentingnya pengaruh birokratis dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan.

Kasus ini mendemonstrasikan bagaimana proses mencapai sebuah konsensus untuk menetapkan kebijakan luar negeri Jerman baru mengutamakan pentingnya deliberasi menyeluruh dan persetujuan dari berbagai pihak. Sistem politik Jerman yang menuntut pembahasan komprehensif di tingkat koalisi dan opsisi, serta mempertimbangkan secara seksama berbagai aspek teknis. Meskipun pada akhirnya membutuhkan waktu yang lama dalam menentukan arah kebijakan, hasil dari kebijakan tersebut lebih legitim karena melalui proses deliberatif yang menyeluruh dan didasari oleh konsensus berbagai pihak.

Kebijakan untuk dukungan militer Jerman terhadap Ukraina mencerminkan kompleksitas dari keputusan politik menjadi sebuah aksi nyata. Jerman membentuk satuan tugas khusus Ukraina yang bernama *Sonderstab Ukraine* yang berada tepat di bawah Kementerian Pertahanan sebagai pusat koordinasi yang mengintegrasikan berbagai pemangku kebijakan Jerman, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Bundeswehr (Bundeswehr, t.t.). Hal ini merepresentasikan *procedural rationality* dalam teori Mearsheimer dan Rosato yang menyebutkan bahwa sebuah negara akan membangun mekanisme kelembagaan spesifik untuk menjamin efektivitas kebijakan. Proses implementasi kebijakan dalam tujuan mendukung persenjataan Ukraina ini memakan kurang

lebih 18-24 bulan (Auswärtiges Amt 2025). Hal ini membuktikan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif tidak hanya berdasarkan pada sebuah kemauan politik, tetapi kapasitas kelembagaan yang kuat, dan evaluasi sistem yang berkelanjutan.

Setelah serangkaian pertimbangan strategis, politis, dan teknis Jerman akhirnya memutuskan untuk mengirimkan tank Leopard 2 ke Ukraina pada Januari 2023. Proses pengiriman ini dimulai setelah Jerman mendapat berbagai tekanan eksternal dari sekutu NATO dan Amerika Serikat yang pada 25 Januari 2023 mulai mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina (Deutsche Welle 2023). Keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat menjadi titik balik bagi Kanselir Olaf Scholz, yang sebelumnya menahan diri karena kekhawatiran eskalasi konflik dengan Rusia. Scholz kemudian menyetujui pengiriman Leopard 2 setelah berbagai proses negosiasi dijalani dalam Bundestag dan memastikan NATO yang bertindak secara kolektif, sehingga beban politik tidak hanya jatuh pada Jerman (Adler 2023).

Selain izin ekspor tank Jerman, Jerman juga memberikan izin bagi berbagai negara yang menggunakan tank milik Jerman seperti Polandia, Finlandia, dan Spanyol untuk mengirim tank Leopard 2 mereka ke Ukraina. Kebijakan ini disetujui oleh *Bundessicherheitsrat* sebagai Dewan Keamanan Nasional yang memverifikasi kesiapan operasional dari tank Leopard 2 tersebut (Connolly 2023). Setelah disetujui, pengiriman tahap pertama 18 unit Leopard 2A6 dikirimkan ke Ukraina dari cadangan *bundeswehr*. Selain tank, Jerman menyiapkan berbagai alat tempur bagi Ukraina seperti *IRIS-T Air Defense System* sebagai sistem pertahanan udara bertujuan untuk melindungi wilayah Ukraina dari serangan udara dari pesawat tempur Rusia, *Howitzer Panzerhaubitze 2000* yang dapat membantu Ukraina untuk melakukan serangan jarak jauh dengan akurasi tinggi dan daya ledak besar, *MRLs*

atau peluncur roket ganda yang dapat meningkatkan kapabilitas militer Ukraina, serta pengiriman *drone* sebagai alat pengintai di garis terdepan medan perang (Hasselbach 2024).

Dalam menanggapi invasi Rusia terhadap Ukraina, pemerintahan Jerman secara kolektif juga memutuskan untuk menanggukkan sertifikasi *Nord Stream 2*. Seperti yang disebutkan dalam pidato Scholz dalam Bundestag sebagai berikut “*Finally ladies and gentlemen, we will do more to ensure a secure energy supply for our country*” (Deutscher Bundestag 2022). Keputusan ini diumumkan oleh Kanselir Olaf Scholz pada 22 Februari 2022 (Appunn dan Wettengel 2022). Pembekuan ini dilakukan melalui pencabutan ulang laporan keamanan pasolan yang sebelumnya disiapkan oleh pemerintah Jerman terdahulu, hal ini menyebabkan jalur pipa *Nord Stream 2* tidak memperoleh izin operasional. Keputusan ini mendapat persetujuan dari hampir semua partai dalam Bundestag. Berbagai partai seperti SPD, Greens, dan FDP menyatakan kesepakatan terhadap penghentian sertifikasi (Chernysev 2022). Pemimpin Partai Hijau, Annalena Baerbock dengan tegas menyetujui langkah tersebut untuk menandakan bahwa Jerman menolak terhadap ketergantungan energi Rusia, sementara FDP menyebut bahwa proyek tersebut perlu untuk di evaluasi ulang berdasarkan keamanan pasokan nasional (Chernyshev et al. 2022).

Dengan demikian, pencabutan sertifikasi *Nord Stream 2* menjadi salah satu dari sekian banyak keputusan strategis yang diraih melalui konsensus politik dari berbagai partai di Bundestag. Hal ini tidak terjadi atau tidak dilegitimasi oleh satu pihak saja, melainkan dijalankan melalui konsensus yang terjalin dalam dialog internal koalisi yang intens dan dukungan oposisi terhadap langkah tersebut. Seperti

pernyataan Scholz “*From diplomacy to arms deliveries to energy. At the end of our debate, we will adopt a joint resolution together*” (Deutscher Bundestag 2022). Kesepakatan tersebut mencerminkan bahwa keputusan nasional tidak hanya bergantung pada keinginan satu individu seperti Kanselir Jerman, tetapi merupakan hasil deliberasi kolektif antara eksekutif dan legislatif. Pembatalan dan penangguhan izin operasional *Nord Stream 2* tersebut menandakan bahwa Jerman secara resmi melepas ketergantungannya terhadap energi Rusia.

Selain itu, Olaf Scholz juga mengumumkan dalam pidatonya bahwa Jerman akan memperluas kontribusinya terhadap sayap timur NATO (Fine and Carlyon, 2024). Hal tersebut terlihat dalam pidato Scholz yang menyebutkan bahwa “*In Lithuania, where we command the NATO task force, we have increased our troops and we are ready to contribute in Eastern Europe*” (Deutscher Bundestag 2022). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mereka akan meningkatkan komitmennya di Lithuania yang menjadi tempat bagi 4.000 tentara Jerman, keputusan ini dianggap tidak biasa bagi para pengamat kebijakan luar negeri karena Jerman menempatkan pasukan secara permanen (Der Bundesminister der Verteidigung 2023). Kemudian, Jerman juga menyiapkan pendanaan sebesar 7,1 miliar euro sebagai kontribusi Jerman terhadap *European Peace Facility* (Bundesregierung 2025). Jerman telah mengerahkan persediaan *Bundeswehr* ke Ukraina sebesar 5,2 miliar euro dan memberikan pelatihan kepada 10.000 tentara Ukraina di Jerman (Overback 2023). Hal tersebut menandai perubahan signifikan dari *NATO-Russia Founding Act* yang menyebutkan tentang lingkungan keamanan (Mello 2024). Pakta tersebut juga menekankan bahwa Rusia juga harus menerapkan pembatasan penempatan pasukan bersenjata di Eropa. Namun, dapat dilihat bahwa hal

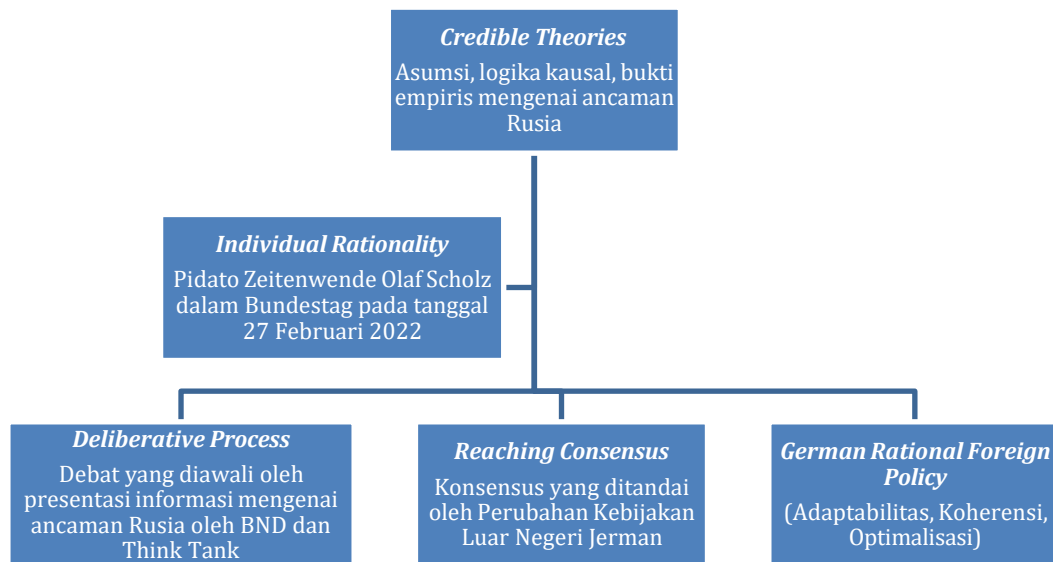
tersebut sudah tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, berbagai keputusan kebijakan yang diambil oleh Jerman menandakan dan menjadi bukti konkret bahwa Jerman telah merubah kebijakan luar negerinya terhadap Rusia.

Dengan demikian, setelah Jerman melalui fase deliberasi intensif dalam sistem politiknya, serangkaian kebijakan luar negeri yang signifikan telah disepakati sebagai respon terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Konsensus yang tercapai meliputi beberapa keputusan fundamental untuk menanggukkan sertifikasi *Nord Stream 2* dan komitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara drastis sebesar 100 miliar euro serta memenuhi target pengeluaran NATO sebesar 2% dari PDB. Berbagai hal tersebut menandakan bahwa Jerman mengalami pergeseran fundamental dari kebijakan pasifis menuju bentuk kebijakan yang lebih responsif. Berbagai kebijakan ini menunjukkan tingkat koherensi karena konsisten dalam mencerminkan istilah *Zeitenwende* oleh Olaf Scholz. Seluruh tindakan Jerman mulai dari peningkatan anggaran pertahanan, bantuan militer terhadap Ukraina, dan melepaskan ketergantungan terhadap Rusia dalam bidang energi selaras dengan tujuan utama Jerman untuk menjaga stabilitas dan keamanan Eropa dari agresi Rusia.

Dalam konteks adaptabilitas, kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa Jerman dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan drastis dalam lingkungan internasional. Jerman mengubah posturnya dari pasifis yang berhati-hati dalam menggunakan kekuatan militer menjadi negara yang responsif dalam memberikan bantuan militer terhadap Ukraina. Adapun optimalisasi kebijakan, Mearsheimer dan Rosato percaya bahwa kebijakan rasional berakar dari proses deliberatif yang sistematis, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa hasil kebijakan luar negeri

sebuah negara akan sempurna. Mearsheimer dan Rosato menekankan bahwa proses deliberatif akan digunakan oleh sebuah negara yang rasional dalam berupaya untuk menemukan strategi terbaik dalam kondisi ketidakpastian (Mearsheimer dan Rosato 2023, 67). Berbagai kebijakan seperti mengirimkan Tank Leopard 2 menunjukkan bahwa Jerman berupaya untuk memilih opsi paling strategis untuk mencapai tujuan nasional dan kolektif di tengah risiko. Kebijakan luar negeri Jerman dapat disebut rasional melalui kerangka pemikiran Mearsheimer dan Rosato karena hal tersebut melibatkan faktor proses pengambilan keputusan yang transparan, melibatkan banyak aktor, dan berdasarkan analisis komprehensif, mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan Jerman terhadap Rusia merupakan tindakan paling optimal dalam kelangsungan hidup negara Jerman.

**Gambar 3. Germany Deliberative Process**



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia pada saat invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 mencerminkan respon strategis yang rasional, terstruktur, dan deliberatif dari sebuah negara dalam menghadapi fenomena internasional. Dengan menggunakan pendekatan teoritis oleh John Mearsheimer dan Sebastian Rosato dalam bukunya *How States Think*, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai sebuah hasil dari proses berpikir negara yang rasional. Negara tersebut dapat dibilang rasional karena melalui proses yang berdasarkan informasi, identifikasi ancaman, dan proses menyusun respon strategis demi menjaga kepentingan nasionalnya.

Sebelum terjadinya invasi Rusia ke Ukraina, kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia didasari oleh pendekatan pragmatis dan kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam *absence of war*, Jerman cenderung mengutamakan stabilitas dan kerjasama. Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 berbagai asumsi tersebut tidak layak untuk dipertahankan. Hal tersebut kemudian menandai perubahan dalam kebijakan luar negeri Jerman. Dalam waktu singkat, Jerman memperkuat anggaran pertahanan, dan mendukung Ukraina melalui pengiriman persenjataan dan Tank Jerman. Perubahan kebijakan luar negeri oleh Jerman ini tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui berbagai proses deliberatif yang melibatkan aktor negara dalam kerangka institusional.

Melalui kerangka *rational state behavior* oleh Mearsheimer dan Rosato, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai sebuah respon strategis oleh Jerman terhadap eskalasi risiko terhadap kepentingan nasional Jerman. Buku *How States Think* oleh Mearsheimer dan Rosato menjelaskan bahwa negara akan bertindak berdasarkan pemahaman mereka mengenai lingkungan eksternal, dan keputusan kebijakan luar negeri merupakan hasil dari pemikiran yang sistematis melainkan tindakan impulsif yang bersifat emosional. Dalam konteks ini, Jerman menunjukkan kemampuannya untuk meninjau kembali orientasi strategisnya dengan menggunakan analisis rasional terhadap kondisi geopolitik yang berubah secara drastis. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Jerman tidak diambil hanya sebagai bentuk solidaritas, melainkan hasil dari perhitungan yang mempertimbangkan skenario jangka panjang dari agresi Rusia. Perubahan kebijakan luar negeri Jerman ini mencerminkan bahwa Jerman memahami orientasi politik yang berdasarkan kerjasama tidak lagi berlaku dalam menghadapi Rusia.

Proses deliberatif dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Jerman mencerminkan mekanisme yang melekat pada sistem politik demokratis Jerman. Berbagai keputusan yang diambil oleh Olaf Scholz tidak bersifat sepihak, melainkan hal tersebut dijalankan melalui diskusi intensif dengan parlemen, mitra koalisi, serta lembaga strategis seperti BND. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Jerman menjadi kebijakan yang rasional karena didasari oleh sistem deliberatif dalam prosesnya. Maka dari itu, kebijakan luar negeri Jerman selaras dengan argumen Mearsheimer dan Rosato yang menyatakan bahwa pemikiran negara seringkali melibatkan kontestasi ide, analisis bukti, dan

pertimbangan *multi-level* yang pada akhirnya menghasilkan keputusan strategis serta rasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia merupakan bentuk dari tindakan rasional yang menggunakan proses deliberatif. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bukanlah hasil dari improvisasi atau tekanan eksternal yang spontan, melainkan sebuah produk dari proses berpikir yang kompleks dan terstruktur. Dalam hal ini, Jerman menunjukkan bahwa sebuah negara demokratis dapat merumuskan sebuah kebijakan luar negeri dan mampu merespon tantangan global dengan mengedepankan rasionalitas serta tanggung jawab strategis dalam sistem internasional yang penuh dengan ketidakpastian.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian yang dilakukan mengenai dinamika perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia menggunakan teori *Rationality in Foreign Policy* oleh John J. Mearsheimer dan Sebastian Rosato dalam bukunya *How States Think* menghasilkan beberapa temuan dalam kebijakan luar negeri Jerman. Penelitian selanjutnya perlu untuk menelaah kembali beberapa kekurangan dalam penelitian ini, yaitu perkembangan *Zeitenwende* sebagai kebijakan luar negeri Jerman yang baru. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor lain di luar hasil temuan yang mungkin masih luput dan tidak tertulis dengan baik. Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menemukan beberapa faktor lain dan perkembangan kebijakan luar negeri Jerman terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adler, K. (2023, January 25). *Why Germany delayed sending Leopard 2 tanks to Ukraine*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-europe-64402928>
- Blumenau, B. (2022). Breaking with convention? Zeitenwende and the traditional pillars of German foreign policy. *International Affairs*, 98(6), 1895–1913. <https://doi.org/10.1093/IA/IIAC166>
- Bundesnachrichtendienst. (2025). *Bundesnachrichtendienst: The Foreign Intelligence Service of Germany*. BND. [https://www.bnd.bund.de/EN/Home/home\\_node.html](https://www.bnd.bund.de/EN/Home/home_node.html)
- Bundesregierung. (2022, February 27). *Policy statement by Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany and Member of the German Bundestag*. The Federal Government. <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/policy-statement-by-olaf-scholz-chancellor-of-the-federal-republic-of-germany-and-member-of-the-german-bundestag-27-february-2022-in-berlin-2008378>
- Bundeswehr. (n.d.). *Real Encouragement for the Ukrainians*. Bundeswehr. Retrieved July 7, 2025, from <https://www.bundeswehr.de/de/meldungen/nachgefragt-mutmacher-ukrainische-bevoelkerung-5828048>
- Connolly, K. (2023, January 24). *Berlin plans to send German Leopard tanks to Ukraine*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2023/jan/24/berlin-plans-to-send-german-leopard-tanks-to-ukraine-according-to-reports>
- Council of the European Union. (2023). *Where does the EU's gas come from?*. Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/where-does-the-eu-s-gas-come-from/>
- Der Bundesminister der Verteidigung. (2023). *Tagesbefehl Dauerhafte Stationierung einer Brigade in Litauen*.
- Deutscher Bundestag. (2022). *Stenographic Report 60th Session*.
- Deutsche Welle. (2023, January 25). *Jerman Akhirnya Setuju Kirim Tank Leopard 2 ke Ukraina*. DW. <https://www.dw.com/id/jerman-akhirnya-setuju-kirim-tank-leopard-2-ke-ukraina/a-64505936>
- Deutscher Bundestag. (n.d.). *German Bundestag - Function and role*. Deutscher Bundestag. Retrieved June 30, 2025, from <https://www.bundestag.de/en/parliament/function-197608>
- Fürstenau, M. (2022, May 2). *Germans split over weapons for Ukraine*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/germans-split-over-heavy-weapons-deliveries-to-ukraine/a-61664515>
- Götz, E. (2019). Explaining Russia's Opposition to NATO Enlargement: Strategic Imperatives, Ideas, or Domestic Politics? . *Open Door: NATO and Euro-Atlantic Security after the Cold War*, 21, 481–494. <https://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2019/04/21-Gotz.pdf>
- Götz, E., & Ekman, P. (2024). Russia's War Against Ukraine: Context, Causes, and Consequences. *Problems of Post-Communism*, 71(3), 193–205. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10758216.2024.2343640>
- Hasselbach, C. (2024). *Ukraine: Which weapons is Germany supplying?*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/ukraine-which-weapons-is-germany-supplying/a-66723828>

- Höhmann, H.-H. ;, Meier, C. ;, & Timmermann, H. (1997). Russia and Germany in Europe: recent trends of political and economic relations. *Rußland Und Deutschland in Europa*, 1–36. <http://www.uni->
- Kinkartz, S. (2022, February 27). *Germany changes tack in “response to Putin’s aggression”* . DW. <https://www.dw.com/en/german-chancellor-olaf-scholz-announces-paradigm-change-in-response-to-ukraine-invasion/a-60932652>
- Knight, B. (2023, January 25). *Scholz defends decision to send battle tanks to Ukraine* . Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/german-chancellor-olaf-scholz-defends-decision-to-send-battle-tanks-to-ukraine/a-64509633>
- Kuzio, T. (2022). Why Russia Invaded Ukraine. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, 21, 40–50. <https://www.jstor.org/stable/48686695?seq=1>
- Mearsheimer, J. J. (2020). NATO enlargement and US grand strategy: a net assessment. *International Politics*, 57(3), 371–400. <https://doi.org/10.1057/S41311-020-00235-7>
- Mearsheimer, J. J., & Rosato, S. (2023). *HOW STATES THINK*. Yale University Press.
- Mello, P. A. (2025a). The party politics of national role contestation: Germany’s ‘traffic light’ coalition and the Russian war against Ukraine. *Cambridge Review of International Affairs*. <https://doi.org/10.1080/09557571.2025.2464924>
- Mello, P. A. (2025b). The party politics of national role contestation: Germany’s ‘traffic light’ coalition and the Russian war against Ukraine. *Cambridge Review of International Affairs*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/09557571.2025.2464924>
- Menon, R., & Ruger, W. (2020). NATO enlargement and US grand strategy: a net assessment. *International Politics*, 57(3), 371–400. <https://doi.org/10.1057/S41311-020-00235-7>
- Michaels, E. (2024). Caught off guard? Evaluating how external experts in Germany warned about Russia’s war on Ukraine. *Intelligence and National Security*, 39(3), 420–442. [https://doi.org/10.1080/02684527.2024.2330133/SUPPL\\_FILE/FINT\\_A\\_2330133\\_SM7849.ZIP](https://doi.org/10.1080/02684527.2024.2330133/SUPPL_FILE/FINT_A_2330133_SM7849.ZIP)
- Molder, H. (2006). NATO’s Role in the Post-Modern European Security Environment, Cooperative Security and the Experience of the Baltic Sea Region. *Baltic Security & Defence Review*, 8, 7–31. [https://www.researchgate.net/publication/257364826\\_NATO's\\_Role\\_in\\_the\\_Post - Modern\\_European\\_Security\\_Environment\\_Cooperative\\_Security\\_and\\_the\\_Experience\\_of\\_the\\_Baltic\\_Sea\\_Region](https://www.researchgate.net/publication/257364826_NATO's_Role_in_the_Post_Modern_European_Security_Environment_Cooperative_Security_and_the_Experience_of_the_Baltic_Sea_Region)
- Nursyahbani, A., & Marzaman, P. A. (2023). Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Stabilitas Suplai Energi di Eropa. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 13(2), 34–52.
- Overback, T. (2023). *Training of Ukrainian soldiers in Germany*. Bundeswehr. <https://www.bundeswehr.de/en/organization/further-fmod-departments/bundeswehr-homeland-defence-command/germany-eumam-ua/trainings-eumam-2023--5722708>
- Oxenstierna, S., & Olsson, P. (2015). *The economic sanctions against Russia*. [https://www.researchgate.net/publication/281619387\\_The\\_economic\\_sanctions\\_a gainst\\_Russia](https://www.researchgate.net/publication/281619387_The_economic_sanctions_a_gainst_Russia)

- Rinke, A., & Marsh, S. (2022, February 25). *Merkel condemns Russian invasion as legacy comes under scrutiny*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/merkel-condemns-russian-invasion-legacy-comes-under-scrutiny-2022-02-25/>
- Saeri, M., Jamaan, A., & Surez, M. F. (2023). Konflik Rusia-Ukraina tahun 2014-2022. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 319–334. <https://doi.org/10.36859/JDG.V8I2.1887>
- Stratievski, D. (2025, March 5). *New Bundestag: Support for Ukraine and a Tough Line Against Russia*. Riddle. <https://ridl.io/new-bundestag-support-for-ukraine-and-a-tough-line-against-russia/>
- Suryadi Bakry, U. (2017). Perspektif Rusia tentang Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13, 75–89. <http://news.ku.edu/2016/09/14/ideology->
- Trenin, D. (2018). Russia and Germany: From Estranged Partners to Good Neighbors. *Carnegie Moscow Center*, 1–18. [https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Article\\_Trenin\\_RG\\_2018\\_Eng.pdf](https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Article_Trenin_RG_2018_Eng.pdf)
- Ulatowski, R. (2024). The Illusion of Germany’s *Zeitenwende*. *Washington Quarterly*, 47(3), 59–76. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2024.2398318>
- United Nations. (2023). Comments and observations by the Federal Republic of Germany on the draft articles on “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction.” *Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations New York*.
- Walsh, A., & Goldenberg, R. (2022, June 7). *Angela Merkel opens up on Ukraine, Putin and her legacy*. DW. <https://www.dw.com/en/angela-merkel-opens-up-on-ukraine-putin-and-her-legacy/a-62052345>
- What We Do* | BND. (n.d.). BND. Retrieved July 1, 2025, from [https://www.bnd.bund.de/EN/What-we-do/work\\_node.html](https://www.bnd.bund.de/EN/What-we-do/work_node.html)
- Yu, H. (2022). European Energy Prospect under the Russo-Ukrainian war. In *Highlights in Science, Engineering and Technology GRET* (Vol. 2022).

